

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA MATARAM 2021



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA MATARAM 2021



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA MATARAM 2021

Nomor ISBN : 978-602-656-62-4-9

Nomor Publikasi : 52710.2117

Katalog BPS : 4102004.5271

Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman : (v) + (80) halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kota Mataram

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Kota Mataram

Desain Kover oleh :

Badan Pusat Statistik Kota Mataram

Penerbit :

Badan Pusat Statistik Kota Mataram

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

Tim Penyusun

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA MATARAM 2021**

Pengarah & Penanggung Jawab:
Ir. AGUS ALWI

Editor:
Ratih Sosilawati, SST

Penulis:
I Gde Eka Dipta Winartha SST

Penyiapan Draft:
Ratih Sosilawati, SST

Desain/Layout:
Dina Rodia Amalia, S.Tr.Stat
Emalia Septiani Hirna, S. Tr.Stat
L. Muhammad Fahmi A.Md.Stat
Riska A.Md.Stat

KATA PENGANTAR

Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah menjalankan program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Agar program tersebut bisa berjalan sesuai yang direncanakan, maka perlu dievaluasi dengan menggunakan sejumlah indikator yang mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Mataram 2021” ini menyajikan indikator-indikator yang dimaksud. Data yang digunakan bersumber dari BPS, Dinas Kesehatan Kota Mataram dan Dinas Pendidikan Kota Mataram. Data yang berasal dari BPS, utamanya bersumber dari hasil Susenas dan Sakernas.

Hasil pengolahan data dari berbagai sumber tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis indikator kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan, serta indikator kemiskinan dan indikator sosial lainnya.

Kami berharap semoga dengan kehadiran publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat dan semoga kehadiran publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data secara luas.

Mataram, November 2021
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kota Mataram,



Ir. AGUS ALWI

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Daftar Lampiran	vi
BAB 1 Pendahuluan	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Sumber Data.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 Konsep dan Definisi	8
2.1 Kependudukan	8
2.2 Kesehatan	11
2.3 Pendidikan.....	12
2.4 Ketenagakerjaan	14
2.5 Kemiskinan dan Pola Konsumsi	15
2.6 Perumahan	18
BAB 3 Kependudukan	21
3.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin	21
3.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	23
3.3 Struktur Umur	24
3.4 Rasio Beban Tanggungan	27
3.5 Usia Perkawinan Pertama.....	28
BAB 4 Kesehatan	31
4.1 Ketersediaan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan.....	32
4.2 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk.....	33
4.3 Penolong Kelahiran	34
4.4 Angka Harapan Hidup (AHH).....	35
BAB 5 Pendidikan	38
5.1 Fasilitas Pendidikan	39
5.2 Partisipasi Sekolah	40
5.5 Rata-rata Lama Sekolah.....	44
BAB 6 Ketenagakerjaan	47
6.1 Angkatan Kerja.....	48
6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	49
6.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	51
6.4 Lapangan Pekerjaan	52
BAB 7 Kemiskinan dan Pola Konsumsi.....	55
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin.....	55

7.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan.....	57
7.3 Indeks Keparahan Kemiskinan	58
7.4 Garis Kemiskinan	59
7.5 Pola Konsumsi.....	61
BAB 8 Perumahan	64
8.1 Status Penguasaan Tempat Tinggal	65
8.2 Kualitas Tempat Tinggal	66
8.3 Fasilitas Air Minum	69
8.4 Fasilitas Buang Air Besar	70
8.5 Sumber Penerangan	71
Lampiran	74

<https://mataramkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Penduduk di Kota Mataram, 2017-2021	22
Tabel 2. Rasio Jenis Kelamin di Kota Mataram, 2017-2021	22
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Mataram Menurut Kelompok Umur, 2018-2020	25
Tabel 4. Rasio Beban Tanggungan Kota Mataram 2019-2021	27
Tabel 5. Persentase Wanita Berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Kota Mataram, 2020	29
Tabel 6. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Mataram, 2020	32
Tabel 7. Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut	33
Tabel 8. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Penolong Persalinan dan Tempat Melahirkan di Kota Mataram Tahun 2020	35
Tabel 9. Fasilitas Sekolah di Kota Mataram, 2020	40
Tabel 10. Persentase Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Mataram Tahun 2020	49
Tabel 11. TPAK dan TKK di Kota Mataram 2017-2020	50
Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Mataram Tahun 2017 – 2020 (Persen).....	51
Tabel 13. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Mataram	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kepadatan Penduduk di Kota Mataram, 2017 – 2021 (Jiwa/km ²)	23
Gambar 2. Piramida Penduduk Kota Mataram, 2021	26
Gambar 3. Angka Harapan Hidup Kota Mataram 2011 – 2020 (Tahun)	36
Gambar 4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Mataram Tahun 2018 – 2020	42
Gambar 5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin di Kota Mataram, 2020	43
Gambar 6. Angka Partisipasi Murni Kota Mataram, 2018 – 2020	44
Gambar 7. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas	45
Gambar 8. Jumlah Angkatan Kerja di Kota Mataram Tahun 2012-2019	48
Gambar 9. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Mataram Tahun 2020	53
Gambar 10. Persentase Penduduk Miskin di Kota Mataram Tahun 2012 – 2019	56
Gambar 11. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Mataram Tahun 2012 – 2019	58
Gambar 12. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Mataram	59
Gambar 13. Garis Kemiskinan di Kota Mataram Tahun 2016 – 2020	60
Gambar 14. Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk Kota Mataram Tahun 2013 – 2020	62
Gambar 15. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Rumah	65
Gambar 16. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Hunian Perkapita	66
Gambar 17. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas	67
Gambar 18. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas	67
Gambar 19. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas	68
Gambar 20. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama	69
Gambar 21. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan	70
Gambar 22. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. RSE Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin, 2020	74
Lampiran 2. RSE Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2020	74
Lampiran 3. RSE Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2020	75
Lampiran 4. RSE Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2020	75
Lampiran 5. RSE Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2020	76
Lampiran 6. RSE Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2020	76
Lampiran 7. RSE Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2020	77
Lampiran 8. RSE Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2020	77
Lampiran 9. RSE Angka Kesakitan menurut Karakteristik, 2020	78
Lampiran 10. RSE Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2020	78
Lampiran 11. RSE Persentase Rumah Tangga* menurut Karakteristik dan Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga, 2020	79
Lampiran 12. RSE Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2020	79
Lampiran 13. RSE Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah), 2020	80

01

PENDAHULUAN

<https://mataramkota.bps.go.id>



BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Demi terealisasinya pembangunan masyarakat yang sejahtera, adil, dan merata sebagaimana tertuang dalam nawacita ke-5, salah satu program prioritas pemerintah adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, komitmen yang tinggi dari pemerintah diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sosial di berbagai bidang, baik di pusat maupun di daerah yang mencakup upaya peningkatan seluruh aspek antara lain pembangunan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Meskipun pembangunan nasional dilakukan secara terus menerus, harus diakui bahwa kesejahteraan yang dicapai baru dinikmati oleh sebagian masyarakat saja, sedangkan sisanya masih dalam kondisi kekurangan atau miskin. Kekurangan yang dimaksud hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan papan. Padahal kesejahteraan mencakup aspek kehidupan yang lebih luas. Untuk mencapai kesejahteraan seperti yang ditargetkan oleh pemerintah memang tidaklah mudah, namun bukan berarti mustahil untuk dicapai. Pemerintah beserta pihak-pihak terkait harus lebih fokus memperhatikan indikator kesejahteraan.

Konsep dan indikator kesejahteraan yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam. Menurut Zastrow, seorang ilmuwan sosial yang dikenal karena karyanya pada teori dan praktik kerja sosial mengemukakan sembilan aspek kesejahteraan penduduk, diantaranya: fisik, perumahan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, jaminan sosial, rekreasi, dan aspek pekerjaan sosial. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2000) untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah antara lain meliputi: tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Kebutuhan di bidang ekonomi dipenuhi melalui terjaminnya besaran nilai pendapatan sekaligus pemerataannya. Lapangan kerja dengan konsep padat karya mutlak diperlukan agar masyarakat dapat memiliki pendapatan yang tetap guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Diperlukan adanya penyediaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang sangat banyak agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan yang diterima. Kebutuhan di Bidang Pendidikan harus dipenuhi, baik yang bersifat formal maupun nonformal. Pendidikan yang berkualitas, mudah dijangkau dan berbiaya murah merupakan impian semua orang. Seiring dengan tingkat pendidikan yang tinggi juga akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Masyarakat segala kalangan harus memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan tanpa memandang status sosial mereka hal ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan. Kualitas kesehatan yang semakin maju dan merata. Layanan kesehatan harus dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat dari kalangan manapun.

Alat ukur yang dibutuhkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat dapat berupa data dan indikator yang mencerminkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian selain penyediaan barang dan jasa yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, penyediaan data yang lengkap, cermat, tepat waktu dan berkesinambungan juga merupakan factor penunjang proses pembangunan yang sangat menentukan kemajuan selanjutnya. Contoh salah satu indikator dibidang sosial yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indikator Kesejahteraan Rakyat. Beberapa negara senantiasa menggunakan konsep dan pengukuran tingkat kesejahteraan rakyat yang bersifat multi-dimensional. Hal ini dikarenakan kesejahteraan merupakan persoalan yang kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan satu sisi saja.

Indikator Kesejahteraan Rakyat ini merupakan resorsis atau dampak dalam arti indikator tersebut mengilustrasikan pengaruh atau dampak langsung dari pembangunan. Dari Indikator Kesejahteraan Rakyat ini dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat kesejahteraan rakyat seperti derajat kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, penduduk miskin, pola konsumsi dan lain-lain. Penyusunan indikator ini menggunakan data statistik yang telah dipilih sedemikian rupa sehingga baik secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai keadaan, proses serta perkembangan kesejahteraan rakyat.

Tidak semua aspek kesejahteraan dalam pengertian luas seperti disebutkan di atas, dapat diukur secara statistik maka tidak mungkin untuk menyajikan data setatistik yang mampu mencakup semua segi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu indikator yang disajikan dalam publikasi ini hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur. Lain halnya dengan statistik ekonomi yang pengumpulan datanya relatif lebih mudah, lebih sering dan

lebih teratur, statistik sosial yang merupakan komponen penyusunan Inkesra pengumpulan datanya relatif lebih sulit, lebih jarang dan kurang teratur pengumpulan datanya di lapangan.

Namun demikian, monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga program-program pembangunan berikutnya dapat lebih optimal. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Nasional Angkatan Kerja (Sakernas) yang diselenggarakan oleh BPS merupakan salah satu sumber informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi ketenagakerjaan.

Publikasi ini menyajikan statistik yang telah dianggap cukup mewakili berbagai bidang dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan mempertimbangkan syarat kelayakan estimasi di tingkat Kabupaten/Kota yang ditunjukkan oleh nilai *Relative Standard Error (RSE)* yang dicantumkan dalam lampiran. Disisi lain, semakin gencar dan giatnya pembangunan yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Mataram belum dapat tergambar tanpa dukungan data yang memadai dan terkini. Keterbandingan dengan daerah lain juga belum dapat diukur tanpa adanya data. Oleh sebab itu paparan data mengenai indikator kesejahteraan rakyat mutlak diperlukan. Informasi dituangkan dalam bentuk tabel dan grafis dimaksudkan agar data dapat lebih mudah dipahami.

1.2 Tujuan

Penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai beberapa indikator yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat di Kota Mataram. Beberapa aspek kesejahteraan seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan dan pola konsumsi serta kondisi perumahan akan disajikan untuk memotret sejauh mana tingkat kesejahteraan yang dicapai di Kota Mataram. Masing-masing aspek tersebut akan diulas secara parsial sehingga akan diperoleh gambaran yang lengkap mengenai pembangunan kesejahteraan yang telah dilakukan di Kota Mataram.

1.3 Ruang Lingkup

Publikasi ini berisi tentang gambaran dan ulasan singkat tentang berbagai variabel yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan rumah tangga di kota Mataram. Dimensi yang akan disajikan dipadukan ke dalam beberapa bab yang meliputi indikator kependudukan,

kehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan dan pola konsumsi serta kondisi perumahan.

1.4 Sumber Data

Statistik dan indikator yang diperlukan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan haruslah berkala sehingga bersumber dari survei tahunan. Hal ini karena adanya suatu kebutuhan untuk mengetahui perubahan setiap tahun dari pelaksanaan program yang telah disusun, dan pengaruhnya pada keadaan sosial masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.

Dalam penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Mataram Tahun 2018, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Nasional Angkatan Kerja (SAKERNAS). Sedangkan data sekunder diperoleh dari publikasi resmi maupun dari Dinas/Instansi terkait. Susenas merupakan salah satu survei yang diselenggarakan oleh BPS yang menyediakan data yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Dari survei-survei yang dilaksanakan BPS, Susenas merupakan survei yang mempunyai cakupan data sosial paling luas. Data yang dikumpulkan antara lain menyangkut bidang-bidang pendidikan, kesehatan/gizi, ketenagakerjaan, perumahan/lingkungan hidup, kriminalitas, sosial budaya, konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, dan alat komunikasi.

Survei ini juga menghimpun keterangan mengenai ketenagakerjaan, yang mencakup jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja, struktur tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan, pengangguran, dan rata-rata jam kerja penduduk yang bekerja. Sebagai pelengkap indikator ketenagakerjaan, digunakan pula hasil Survei SAKERNAS yang merupakan survey rutin yang dilakukan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai ketenagakerjaan. Sebagai bahan pelengkap, akan digunakan juga data sekunder yang berasal dari SKPD terkait di lingkup pemerintahan Kota Mataram.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyajian pada publikasi ini pada intinya berupa tabel dan grafik yang disertai ulasan singkat (analisa deskriptif) terhadap beberapa data dari masing-masing variabel yang ada dalam ruang lingkup penulisan. Secara garis besar data/variabel kesejahteraan rakyat dalam publikasi ini dikelompokkan menjadi delapan bagian.

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang penulisan publikasi, tujuan, ruang lingkup analisis dan sumber data yang digunakan dalam publikasi.

Bagian kedua merupakan konsep dan definisi yang digunakan dalam penulisan publikasi.

Bagian ketiga merupakan data kependudukan, mencakup antara lain jumlah penduduk menurut jenis kelamin, umur, dan status perkawinan.

Bagian keempat, menyajikan kondisi kesehatan penduduk yang menyangkut keluhan kesehatan, jumlah hari sakit, penolong kelahiran balita, kondisi balita dan pemanfaatan fasilitas kesehatan.

Bagian kelima ditampilkan kondisi pendidikan penduduk yang mencakup partisipasi sekolah, status pendidikan, tingkat pendidikan, dan melek huruf.

Bagian keenam ditampilkan data bidang ketenagakerjaan, yang mencakup angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat kesempatan kerja, tingkat pengangguran, dan lapangan pekerjaan.

Bagian ketujuh menyajikan gambaran mengenai persentase penduduk miskin, garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman, keparahan, dan pola kemiskinan.

Bagian kedelapan yang merupakan bagian akhir disajikan data kondisi perumahan.

Pada lampiran publikasi, disajikan pula angka estimasi *sampling error* yang menunjukkan besarnya kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik sampling dalam suatu survei. Besarnya *sampling error* tersebut berhubungan dengan presisi dari suatu angka estimasi. Pada umumnya, hal tersebut dinyatakan dengan besarnya RSE yang merupakan rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi suatu variabel. Nilai estimasi sebagai berikut:

- a. $RSE \leq 25\%$ dianggap akurat
- b. $RSE > 25\%$ tetapi $\leq 50\%$ perlu hati-hati jika ingin digunakan

$RSE > 50\%$ nilai estimasi tersebut dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan nilai estimasi dengan $RSE \leq 25\%$.

02

KONSEP DAN DEFINISI

<https://mataramkota.bps.go.id>



BAB 2

Konsep dan Definisi

2.1. Kependudukan

- **Penduduk** adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari enam bulan.
- **Laju Pertumbuhan Penduduk** adalah persentase perubahan penduduk dalam periode tertentu (biasanya setahun). Laju ini merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Kekuatan yang menambah jumlah penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk, sedangkan yang mengurangi adalah kematian dan migrasi keluar. Laju pertumbuhan alamiah adalah laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi faktor kelahiran dan faktor kematian, laju pertumbuhan non alami/migrasi hanyadipengaruhi oleh migrasi masuk dan migrasi keluar, sedangkan laju pertumbuhan total dihitung dari selisih jumlah kelahiran dengan kematian ditambah dengan selisih migrasi masuk dengan migrasi keluar. **Diby Soegimo (2009)** dalam bukunya menjelaskan ada 3 klasifikasi pertumbuhan penduduk yang harus kita pahami, yaitu:
 - a. Pertumbuhan penduduk termasuk cepat apabila pertumbuhan 2% lebih dari jumlah penduduk tiap tahun,
 - b. Pertumbuhan penduduk termasuk sedang apabila pertumbuhan itu antara 1%-2%,
 - c. Pertumbuhan penduduk termasuk lambat apabila pertumbuhan itu antara 1% atau kurang.

Rumus yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk sebagai berikut:

$$P_t = P_0(1 + r)^t$$

Dimana:

P_t = jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = jumlah penduduk tahun 0

r = laju pertumbuhan penduduk

- **Tingkat Kepadatan Penduduk** adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah per kilometer persegi. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Tingkat Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Suatu Wilayah}}{\text{Luas Wilayah (Km}^2\text{)}}$$

- **Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)** adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Jenis Kelamin} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Laki - laki}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100$$

- **Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*)** adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam usia tidak produktif (0-14 tahun) /penduduk usia muda dan 65 tahun ke atas/penduduk usia tua) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rumus yang digunakan adalah

$$\text{Angka Beban Tanggungan} = \frac{\text{Penduduk Usia 1 - 14 dan 65 +}}{\text{Penduduk Usia 15 - 64 tahun}} \times 100$$

- **Rumah Tangga.** Rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus.

a) **Rumah Tangga Biasa** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Ada beberapa macam bentuk rumah tangga biasa, diantaranya:

- 1) orang yang tinggal bersama isteri dan anaknya;
- 2) orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makannya sendiri;
- 3) keluarga yang terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu segmen.
- 4) rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondok nya kurang dari 10 orang.

- 5) pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, isteri serta anggota rumah tangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya.
- 6) masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri.

b) Rumah Tangga Khusus adalah:

- 1) orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga; dan
- 2) kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah lebih dari 10 orang.

- **Anggota Rumah Tangga** adalah semua orang yang biasa bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada saat pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga. Orang yang telah tinggal di suatu rumah tangga 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal di suatu rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap di rumah tangga tersebut dianggap sebagai anggota rumah tangga.

- **Status Perkawinan**, antara lain:

Belum Kawin status dari mereka yang belum terikat dalam perkawinan.

Kawin adalah mempunyai isteri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

Cerai Hidup adalah berpisah sebagai suami/ isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain

karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.

Cerai Mati adalah ditinggal mati oleh suami (bagi perempuan) atau isterinya (bagi laki-laki) dan pada saat pencacahan belum kawin lagi.

2.2. Kesehatan

- **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survey (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan adalah rasio antara banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dibagi dengan jumlah penduduk pada saat tertentu. Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan diantaranya panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi atau keluhan lainnya juga termasuk orang yang memiliki penyakit akut atau penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan). Rumus penghitungannya sebagai berikut:

$$PKK = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$

- **Angka Morbiditas (Angka Kesakitan)** merupakan presentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari (sakit). Rumus penghitungannya sebagai berikut:

$$AM = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Sakit}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$

- **Konsultasi** adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk membicarakan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.
- **Rawat jalan atau berobat jalan** adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri. Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden

yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan dan harus menginap.

- **Rata-rata Lama Sakit** adalah rata-rata lamanya terganggu kesehatan (dalam hari) yaitu terganggunya kegiatan/aktivitas sehari-hari bagi seseorang yang mengalami keluhan kesehatan. Menunjukkan rata-rata lama hari sakit yang dialami penduduk. Rata-rata lama sakit dimaksud selama satu bulan terakhir (maksimal per individu 30 hari). Rumus penghitungan sebagai berikut:

$$RRLS = \frac{\text{Total dari Lama Sakit}}{\text{Jumlah Penduduk yang sakit}}$$

- **Angka Harapan Hidup** adalah perkiraan rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah.

2.3. Pendidikan

- **Sekolah** adalah kegiatan belajar di sekolah formal dan non formal (Paket A, B, dan C) mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.
- **Tidak/belum pernah sekolah** adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- **Masih bersekolah** adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- **Tidak bersekolah lagi** adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- **Tamat sekolah** adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.
- **Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan)** adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.
- **Dapat membaca dan menulis** adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat

membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

- **Angka Melek huruf (AMH)** adalah perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun keatas. Rumus penghitungannya sebagai berikut:

$$AMH = \frac{\text{Penduduk 15 Tahun Keatas yang Melek Huruf}}{\text{Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas}} \times 100$$

- **Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling/MYS)** adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk dewasa (15tahun ke atas) di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalaninya. MYS dihitung dengan menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.
- **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih sekolah dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$APS_i = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah Kelompok Umur } i}{\text{Jumlah Penduduk Kelompok Umur } i}$$

dimana i = kelompok usia 7-12, 13-15, 16-18.

- **Angka Partisipasi Kasar (APK)** merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Kegunaan indikator ini adalah Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Rumus yang digunakan:

$$APK \text{ Jenjang Pendidikan } i = \frac{\text{Jumlah Murid pada Jenjang Pendidikan } i}{\text{Jumlah Penduduk Usia yang Bersesuaian}} \times 100 \%$$

- **Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah perbandingan jumlah penduduk yang masih sekolah pada jenjang tertentu (SD, SLTP atau SLTA) pada kelompok usia yang sesuai dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian. Manfaat indikator ini adalah Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$APSi = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah usia bersesuaian } i}{\text{Jumlah Penduduk Usia Bersesuaian}}$$

dimana i = jenjang pendidikan, SD(7-12), SMP (13-15), SMA (16-18).

2.4. Ketenagakerjaan

- **Angkatan Kerja** adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun untuk sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja bebas profesional seperti dukun dan dalang). Disamping itu termasuk pula dalam pengangguran yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan/usaha tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, sudah diterima kerja namun belum mulai bekerja dan juga mereka yang sudah merasa putus asa dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- **Bukan Angkatan Kerja** adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja dan mencari kerja.
- **Kegiatan yang Terbanyak Dilakukan** adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibanding dengan kegiatan lainnya.
- **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara berturut-turut dan tidak terputus dalam satu minggu, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.
- **Punya Pekerjaan Tetapi Sementara Tidak Bekerja** adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok.

- **Lapangan usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/ usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- **Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha (sebagai pengusaha), buruh/karyawan, atau pekerja keluarga tidak dibayar.
- **Jam kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- **Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)** adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).
- **Penduduk yang menganggur** adalah mereka yang termasuk angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan termasuk menunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

2.5. Kemiskinan dan Pola Konsumsi

- **Penduduk Miskin.** Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

- **Garis Kemiskinan**

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan indikator ini adalah data Survei Sosial

Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Rumus penghitungan:

$$GK = GKM + GKNM$$

dengan:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM:

Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference population*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM^*_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

GKM^*_{jp} : Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi

p .

P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p .

Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p .

V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p .

j : Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p : Provinsi ke- p .

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga

:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{kjp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{kjp}}$$

Dimana :

K_{kjp} : Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p
 \overline{HK}_{jp} : Harga rata-rata kalori di daerah j di provinsi p

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$: Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j dan provinsi p
 V_{kjp} : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p
 r_{kj} : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j
 k : Jenis komoditi non-makanan terpilih
 j : Daerah (Perkotaan atau pedesaan)
 p : Provinsi ke- p

- **Indeks Kedalaman Kemiskinan**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi

Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 1$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

- **Indeks Keparahan Kemiskinan**

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan KOR.

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

- **Konsumsi/Pengeluaran Rumah Tangga** adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan (pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta)
- **Konsumsi Rata-rata Perkapita Setahun**, diperhitungkan dari konsumsi rata-rata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan $30/7 \times 12$.
- **Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan**, mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah, termasuk minuman, tembakau dan sirih dalam jangka waktu sebulan.

2.6. Perumahan

- **Bangunan Fisik** adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat

tinggal.

- **Bangunan Sensus** adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri
- **Luas Lantai** adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- **Rumah Tangga** adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
- **Dinding** adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- **Atap** adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- **Air Leding** adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).
- **Air Sumur/Mata Air Terlindung** adalah bila lingkaran mulut sumur/mata air tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter diatas tanah dan sedalam 3 meter dibawah tanah dan disekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut/perigi.

BAB 3

Kependudukan

Penduduk memiliki peran penting dalam pembangunan, yaitu sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan, penduduk merupakan aktor utama dalam menggerakkan perekonomian daerah, sedangkan sebagai sasaran pembangunan penduduk berperan sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri, yaitu untuk mencapai kesejahteraannya. Kesejahteraan ini dapat dicapai jika penduduk memiliki kualitas yang baik dan dapat memperkuat faktor produksi. Apabila hal tersebut telah terpenuhi, maka peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi potensi yang besar untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Sebaliknya, penambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan pokok, dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan dan menimbulkan masalah lainnya seperti, kesenjangan sosial, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan bahkan kesenjangan dalam hal perumahan.

Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi seperti penyediaan pangan yang tidak mencukupi, dapat menimbulkan terjadinya kelaparan serta kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas akibat kesenjangan sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

3.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahunnya. Pada Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kota Mataram masih berjumlah 402.843 dan tahun 2021 penduduk Kota

Mataram naik menjadi 516.573 jiwa. Dengan kata lain, dalam sebelas tahun terakhir rata-rata setiap tahunnya penduduk Kota Mataram meningkat sebanyak 10.339 jiwa atau sebesar 2,57 persen per tahun. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di Kota Mataram tahun 2017-2021.

Tabel 1

Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Penduduk di Kota Mataram, 2017-2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk (Jiwa)	468.509	477.476	486.715	505.660	516.573
Pertumbuhan Penduduk (%)	2,00	1,91	1,93	3,89	2,16

Sumber: BPS Kota Mataram

Berdasarkan Tabel 1 selama tahun 2017 hingga 2021 terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kota Mataram. Namun, peningkatan pada tahun 2021 lebih kecil dibandingkan tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin mengecil menunjukkan adanya upaya pengendalian jumlah kelahiran Kota Mataram. Akan tetapi, kenaikan pertumbuhan jumlah penduduk tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 haruslah menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, harus diselenggarakan program yang mampu membuka kesempatan kerja yang lebih besar, selain itu juga meningkatkan akses pendidikan, kesehatan dan perumahan layak bagi penduduk Kota Mataram.

Tabel 2

Rasio Jenis Kelamin di Kota Mataram, 2017-2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rasio Jenis Kelamin (%)	98	98	98	100	100

Sumber: BPS Kota Mataram

Indikator lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan penduduk adalah rasio jenis kelamin (*sex ratio*). Rasio jenis kelamin Kota Mataram dalam dua tahun terakhir juga selalu 100 yang artinya jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan. Berdasarkan Tabel 2 *sex ratio* di Kota Mataram pada tahun 2021 sebesar 100 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan

terdapat 100 penduduk laki-laki. Kondisi ini seharusnya dapat menjadi salah satu informasi dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan gender.

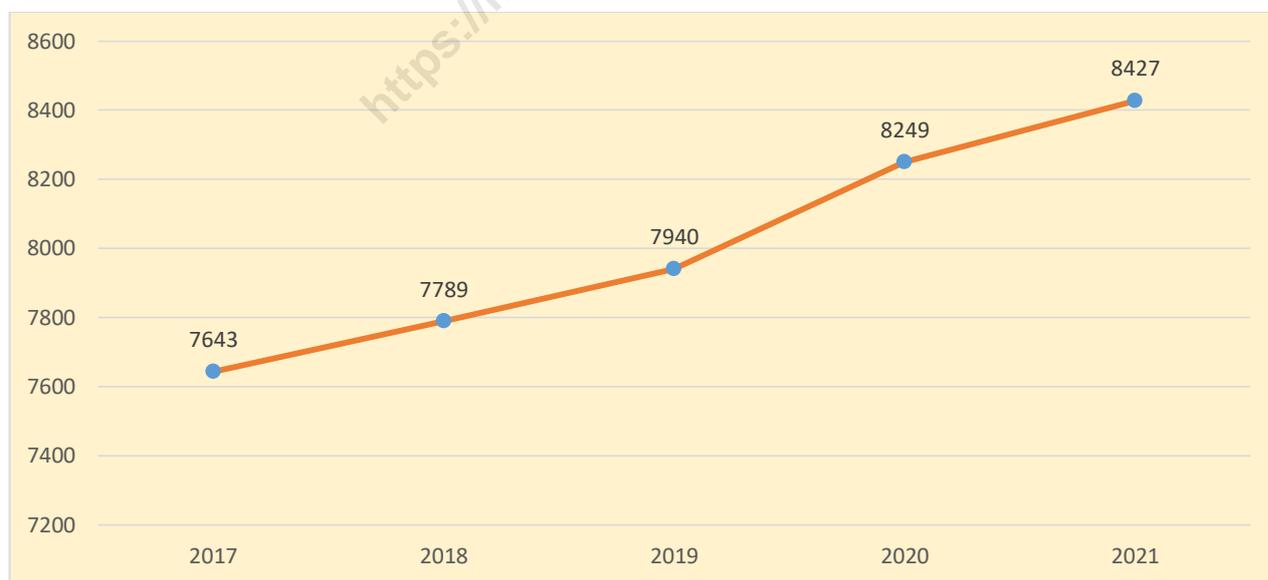
3.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk wilayah perdesaan untuk berusaha di daerah perkotaan. Ketidakmerataan atau ketimpangan sebaran penduduk tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Masalah sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (migrasi). Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga tidak heran jika daerah perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Gambar 1

Kepadatan Penduduk di Kota Mataram, 2017 – 2021 (Jiwa/km²)



Sumber: BPS Kota Mataram

Secara umum, tingkat kepadatan penduduk (*population density*) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu, atau dengan kata lain merupakan angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk per km²

pada suatu wilayah. Penduduk Kota Mataram setiap tahun mengalami peningkatan dengan luas wilayah yang relatif tidak berubah, sehingga kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kepadatan penduduk Kota Mataram tahun 2021 mencapai 8.427 jiwa/km² meningkat sebesar 178 jiwa/km² (8.249 jiwa/km²) pada tahun 2020.

3.3 Struktur Umur

Data kelompok umur penduduk sangat berguna untuk menganalisis demografi, sosial serta perencanaan ekonomi suatu daerah/negara. Pada umumnya penduduk suatu daerah/negara maju tergolong penduduk tua (*old population*) dan penduduk daerah/negara berkembang tergolong penduduk muda (*young population*).

Penentuan kondisi struktur umur penduduk, apakah tergolong penduduk tua atau muda dapat dilakukan dengan melihat umur median penduduk dengan cara antara lain yaitu:

- Tergolong penduduk muda (*young population*), jika umur median lebih kecil dari 20 tahun.
- Tergolong penduduk intermediate (transisi), jika umur median antara 20–30 tahun.
- Tergolong penduduk tua (*old population*), jika umur median lebih besar dari 30 tahun.

Pengelompokan umur digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan kebijaksanaan/keputusan yang berkaitan dengan kelompok-kelompok umur, misalnya balita (0 – 4 tahun), angkatan kerja, penduduk usia sekolah, penduduk usia subur dan lain sebagainya.

Komposisi penduduk Kota Mataram didominasi oleh kelompok usia muda dan usia produktif. Pada tahun 2020 jumlah balita sebesar 42.594 jiwa. Banyaknya jumlah balita setiap tahun mengindikasikan beberapa hal, diantaranya banyak kelahiran baru yang berarti program Keluarga Berencana (KB) belum berjalan secara efektif. Fenomena ini bisa juga mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan balita dan menurunnya angka kematian bayi di Kota Mataram. Tentu saja untuk membuktikan indikasi tersebut diperlukan penelitian lebih lanjut, namun signal yang nampak menjadi indikasi positif akan pembangunan kesehatan masyarakat Kota Mataram sekaligus sinyal negatif bagi pelaksanaan program KB. Piramida penduduk akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai komposisi penduduk Kota Mataram.

Tabel 3

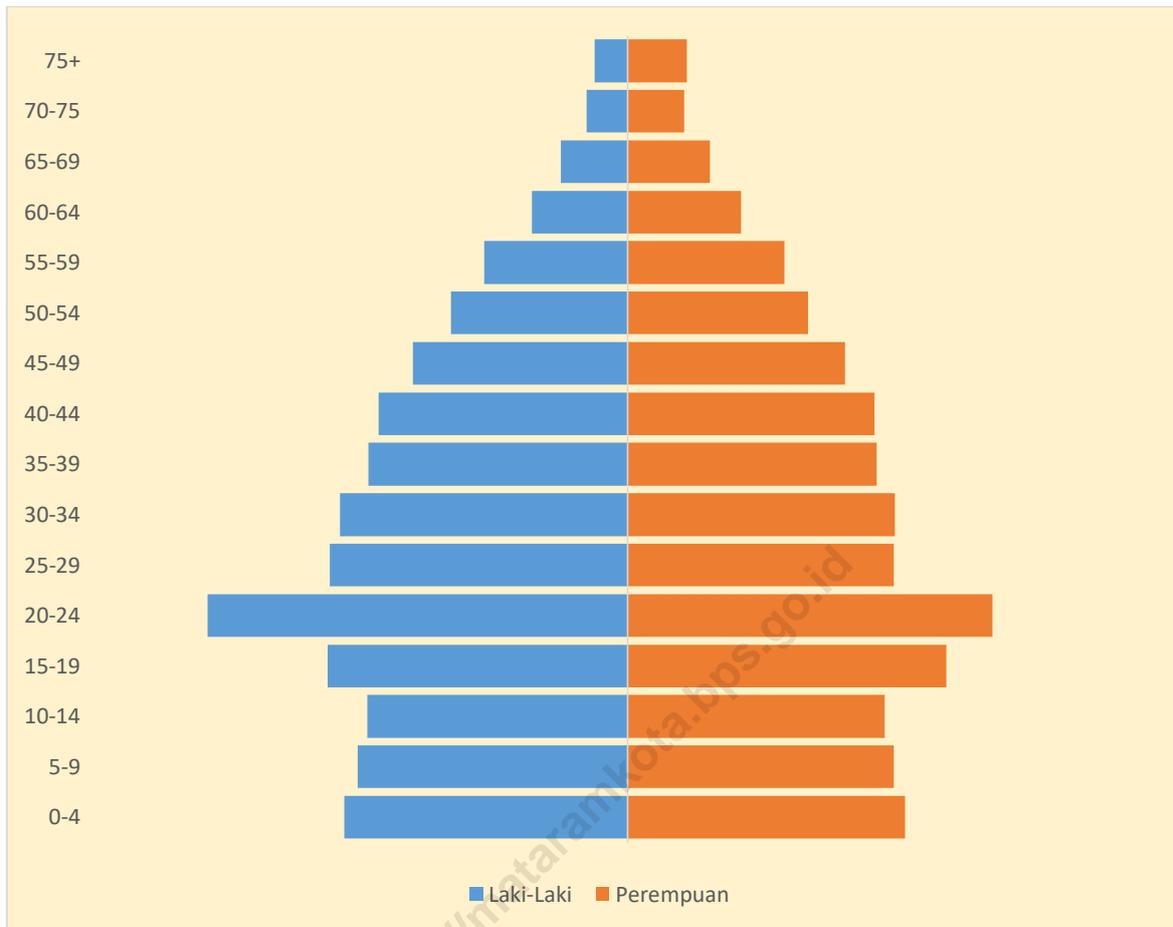
Jumlah Penduduk Kota Mataram Menurut Kelompok Umur, 2019-2021

KELOMPOK UMUR	2019		2020		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah	%	Jumlah
0-4	42.407	8,71	42.594	8,42	42.738	8,27
5-9	41.887	8,61	39.999	7,91	40.894	7,92
10-14	40.742	8,37	38.703	7,65	39.401	7,63
15-19	47.887	9,84	46.384	9,17	47.134	9,12
20-24	60.383	12,41	59.346	11,74	59.841	11,58
25-29	40.599	8,34	42.550	8,41	42.999	8,32
30-34	38.183	7,85	41.542	8,22	42.266	8,18
35-39	35.183	7,23	37.921	7,50	38.745	7,50
40-44	34.226	7,03	36.780	7,27	37.798	7,32
45-49	28.897	5,94	32.098	6,35	32.957	6,38
50-54	22.658	4,66	26.146	5,17	27.206	5,27
55-59	19.011	3,91	21.899	4,33	22.858	4,42
60-64	13.375	2,75	15.149	3,00	15.962	3,09
65-69	9.165	1,88	10.804	2,14	11.346	2,20
70-74	6.004	1,23	7.068	1,40	7.400	1,43
75+	6.108	1,25	6.677	1,32	7.028	1,36
Jumlah	486.715	100	505.660	100	516.573	100

Sumber: BPS Kota Mataram

Gambar 2

Piramida Penduduk Kota Mataram, 2021



Sumber: BPS Kota Mataram

Sebagaimana tampak pada piramida penduduk, kelompok umur 20 – 24 tahun merupakan kelompok umur yang jumlah penduduknya terbesar di Kota Mataram. Agar dapat menjadikan penduduk usia produktif ini sebagai potensi wilayah, maka harus dapat dijamin kualitas penduduk tersebut. Apabila penduduk ini berkualitas maka daya saingnya akan tinggi sehingga secara langsung akan berdampak pada kualitas kesejahteraan penduduk Kota Mataram.

Implikasi lain yang dapat muncul dari besarnya penduduk usia sekolah dan produktif adalah lapangan pekerjaan, ketersediaannya harus dapat dijaga oleh pemerintah untuk dapat menampung penduduk usia produktif ini karena jika tidak tentu saja akan berdampak pada banyaknya pengangguran. Mengingat penduduk usia sekolah juga cukup banyak, maka kebijakan di bidang pendidikan juga perlu dicermati agar dapat meningkatkan kualitas intelektual masyarakat Kota Mataram.

3.4 Rasio Beban Tanggungan

Angka beban tanggungan penduduk dinyatakan dengan rasio perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0 – 14 tahun) dan usia (65 tahun keatas), dengan penduduk produktif (15 – 64 tahun), yang diasumsikan produktif secara ekonomis. Angka beban tanggungan ini disebut juga dengan istilah *Dependency Ratio* untuk anak-anak dan *Dependency Ratio* untuk lansia. Semakin tinggi beban angka tanggungan ini, maka semakin banyak beban penduduk yang produktif untuk menanggung penduduk yang tidak produktif.

Angka beban tanggungan penduduk disebut juga dengan Angka Ketergantungan penduduk. Angka ketergantungan penduduk yang baik adalah angka ketergantungan yang semakin lama semakin kecil, artinya jumlah anak-anak dan lansia yang harus ditanggung oleh penduduk produktif itu semakin kecil atau semakin sedikit untuk setiap 100 penduduk produktif.

Tabel 4
Rasio Beban Tanggungan Kota Mataram 2019-2021

Keterangan	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Ketergantungan Total	42,98	40,53	40,46

Sumber: BPS Kota Mataram

Rasio beban tanggungan ekonomi penduduk usia produktif terhadap penduduk usia muda di Kota Mataram Tahun 2021 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun atau dapat dikatakan semakin membaik. Sedangkan rasio beban tanggungan ekonomi penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tua di Kota Mataram Tahun 2021 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat atau dapat dikatakan semakin kurang baik. Tetapi secara umum, rasio beban tanggungan ekonomi penduduk usia produktif terhadap penduduk usia muda maupun tua di Kota Mataram Tahun 2021 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun atau dapat dikatakan semakin membaik. Pada tahun 2019 tercatat rasio ketergantungan 42,98 kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 40,53 dan di Tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 40,46. Angka tersebut menunjukkan arti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 41 penduduk usia non produktif.

Dipilah menurut usia muda dan tua, rasio beban tanggungan usia muda lebih besar dari usia tua sehingga penduduk usia produktif lebih banyak menanggung penduduk usia muda dari pada tua. *Dependancy ratio* usia muda yang bernilai 33,45 diartikan bahwa dari 100

penduduk usia produktif harus menanggung 34 penduduk usia muda, sedangkan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 7,01 mengandung arti 100 penduduk usia produktif harus menanggung 7 penduduk usia tua.

Fenomena ini kembali menekankan betapa perlunya menggalakkan program Keluarga Berencana (KB) karena dapat dilihat bahwa penduduk usia muda ini memang membuat beban tanggungan ekonomi penduduk produktif menjadi besar. Paradigma bahwa KB adalah untuk menghentikan kelahiran harus diubah dan diganti menjadi merencanakan kehamilan. Dengan merencanakan kehamilan, keluarga dapat berupaya untuk menjarangkan kehamilan agar setiap anak yang dilahirkan menjadi lebih berkualitas dan orang tua dapat lebih fokus dalam menuangkan kasih sayang dan mendidik anak-anaknya.

Bonus demografi akan dapat diraih saat Rasio Ketergantungan telah mencapai 50. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kota Mataram telah lama memasuki tahap Bonus Demografi. Gaung Bonus Demografi ini memerlukan perhatian serius, khususnya dari pemerintah setempat terkait dengan persiapan menyongsong fenomena yang hanya terjadi satu kali dalam waktu 100 tahun di suatu wilayah. Dalam jangka pendek pemerintah perlu memperluas lapangan pekerjaan agar dapat menyerap tenaga kerja, oleh karena itu generasi muda diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerjanya melalui pendidikan dan pelatihan.

3.5. Usia Perkawinan Pertama

Faktor usia dalam ikatan perkawinan sangat berpengaruh terhadap tingkat fertilitas bagi seorang wanita, yang merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk. Semakin rendah usia pada saat perkawinan seorang wanita, maka akan semakin besar masa reproduksi yang dilwati sehingga peluang untuk melahirkan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi usia pada saat perkawinan seorang wanita, maka semakin rendah masa reproduksi yang dilewati, sehingga peluang untuk melahirkan juga semakin rendah.

Pada dasarnya ada dua bentuk perkawinan. Pertama, menunjukkan perubahan status dari belum kawin menjadi berstatus kawin. kedua, perubahan dari status cerai menjadi status kawin. Dalam kaitan dengan sub bagian ini, defenisi yang digunakan adalah yang pertama, yaitu perubahan dari status belum kawin menjadi kawin.

Wanita berumur 10 tahun ke atas yang melangsungkan perkawinan, akan melalui suatu proses biologis, yaitu melahirkan sampai dengan masa menopause. Oleh karena itu, umur perkawinan pertama dianggap mempengaruhi panjangnya masa reproduksi.

Tabel 5

Persentase Wanita Berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Kota Mataram, 2020

Usia Perkawinan Pertama	Persentase Wanita Berusia 10 Tahun Keatas
(1)	(2)
< 15	1,16
15 – 17	16,35
18 – 24	60,52
25 – 34	21,14
35 +	0,83
Total	100,00

Sumber: BPS Kota Mataram

Berdasarkan Tabel 5 di atas sebagian besar usia saat perkawinan pertama adalah 18 – 24 tahun (60,52%) kemudian diikuti usia 25-34 tahun (21,14%) dan usia 15-17 tahun (16,35%). Hal yang perlu mendapat perhatian adalah ada sebanyak 16,35 persen wanita usia perkawinan pertamanya antara 15 – 17 tahun dan 1,16 persen usia kurang dari 15 tahun. Usia tersebut dinilai masih terlalu muda dan masih merupakan usia sekolah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menentukan kebijakan yang mampu menekan tingkat perkawinan pada usia tersebut. Salah satunya dengan menetapkan kewajiban untuk mengenyam pendidikan hingga lulus SMA, dan mengurangi beban biaya sekolah. Selain itu juga melakukan perbaikan peraturan yang berhubungan dengan pendidikan sehingga penduduk usia sekolah akan memilih untuk melanjutkan pendidikannya, yang mana akan berdampak pada meningkatnya angka partisipasi untuk sekolah.

04

KESEHATAN

<https://monev.kabupatenkota.bps.go.id>

BAB 4

Kesehatan

Kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin baik proses pembangunan suatu negara/wilayah. Sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Maka, pembangunan kesehatan selain diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga untuk meningkatkan mutu dan kemudahan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berkaitan dengan pembangunan di bidang kesehatan, pemerintah Kota Mataram sudah berupaya mengadakan beberapa program dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan, yaitu Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Angka Kesakitan, dan Rata-rata Lama Sakit. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan.

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui sistem kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh pemerintah, seperti Puskesmas, Posyandu, pos kesehatan desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di antaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

4.1 Ketersediaan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar dan mudah diakses oleh masyarakat merupakan syarat mutlak bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan di Kota Mataram tahun 2020 terdiri dari 15 unit Rumah Sakit (RSU Pemerintah dan RS Swasta) dan 11 unit Puskesmas. Keberadaan Puskesmas menyebar diseluruh kecamatan, dimana di setiap kecamatan terdapat antara 1 – 3 unit puskesmas. Terdapat pula 356 Posyandu yang lokasinya tersebar di semua kecamatan di Kota Mataram.

Tabel 6
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Mataram, 2020

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Posyandu
(1)	(2)	(3)	(4)
Ampenan	2	2	57
Sekarbela	1	2	41
Mataram	6	1	61
Selaparang	3	3	64
Cakranegara	1	1	73
Sandubaya	2	2	60
Jumlah	15	11	356

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram

Perlu diperhatikan bahwa Kecamatan Sekarbela dan Cakranegara memiliki fasilitas kesehatan paling sedikit daripada kecamatan lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian sebab jumlah penduduk di Kecamatan Sekarbela dan Cakranegara termasuk berjumlah besar jika

dibandingkan dengan penduduk kecamatan lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk melakukan pemerataan fasilitas kesehatan di setiap kecamatan.

4.2. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Masyarakat yang sehat biasanya diidentikkan dengan masyarakat yang sejahtera. Negara juga menjamin pelayanan kesehatan masyarakat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana pemerintah menjamin ketersediaan dan pemerataan pelayanan kesehatan, dan juga sesuai Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dimana pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas kesehatan masyarakat digunakan beberapa indikator yang menggambarkan kualitas kesehatan masyarakat dan pola berobat masyarakat.

Jika Dinas Kesehatan bertugas mencatat keluhan kesehatan berdasarkan pencatatan atas kasus yang terjadi di fasilitas kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), maka BPS melalui Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) bertugas mencatat keluhan kesehatan melalui pendekatan rumah tangga. Dengan demikian, individu yang memiliki keluhan kesehatan namun tidak berobat ke fasilitas kesehatan yang ada akan tetap tercakup. Angka kesakitan (*morbiditas*) menunjukkan adanya gangguan atau keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, sekolah, mengurus rumah tangga, maupun kegiatan lainnya.

Tabel 7

Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Kota Mataram, 2020

Keterangan	Laki-laki	Perempuan	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Kesakitan	13,67	16,56	15,13

Sumber: BPS Kota Mataram (diolah)

Keluhan kesehatan merupakan gejala adanya suatu penyakit dan umumnya berupa panas, batuk, pilek, asma/sesak napas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan penyakit lainnya. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di suatu wilayah, maka semakin rendah derajat kesehatan masyarakat wilayah tersebut.

Indikator angka kesakitan (*morbiditas*) juga dapat digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Berdasarkan Tabel 7, angka kesakitan penduduk Kota Mataram pada Tahun 2020 mencapai 15,13 persen, dimana angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 21,40 persen. Angka kesakitan penduduk perempuan lebih tinggi dari penduduk laki-laki, yaitu sebesar 16,56 persen, sedangkan laki-laki hanya sebesar 13,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan penduduk kota mataram meningkat dibandingkan tahun 2019. Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan ini, diperlukan adanya upaya untuk mencegah terjadinya penyakit dengan melakukan pola hidup sehat dan bersih serta sanitasi yang baik. Selain itu penyediaan vitamin ataupun herbal yang cukup bagi masyarakat agar daya tahan tubuh masyarakat semakin baik dan mampu mencegah penyakit.

4.3 Penolong Kelahiran

Salah satu unsur yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dan aman jika dibanding ditolong oleh bukan tenaga medis seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan, kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi atau si ibu.

Pada tahun 2020 penolong kelahiran di Kota Mataram pada umumnya adalah tenaga kesehatan, yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan persentase wanita berumur 15 – 49 tahun yang berstatus pernah kawin, dimana 100 persen penolong kelahiran anak lahir hidup terakhirnya adalah tenaga kesehatan.

Sarana atau fasilitas tempat melahirkan sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak. Pada tahun 2020 tempat melakukan persalinan adalah 100 persen di fasilitas kesehatan. Tempat yang banyak dipilih untuk melahirkan adalah fasilitas kesehatan berupa RS Pemerintah, RS Swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, dan tempat praktek tenaga kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat telah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia demi kesehatan ibu dan anak pada saat melahirkan.

Tabel 8**Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Penolong Persalinan dan Tempat Melahirkan di Kota Mataram Tahun 2020**

Keterangan	2020
(1)	(2)
Penolong Persalinan	
Tenaga Kesehatan	100
Bukan Tenaga Kesehatan	0
Tempat Melahirkan	
Fasilitas Kesehatan	100
Bukan Fasilitas Kesehatan	0

Sumber: BPS Kota Mataram (diolah)

4.4 Angka Harapan Hidup (AHH)

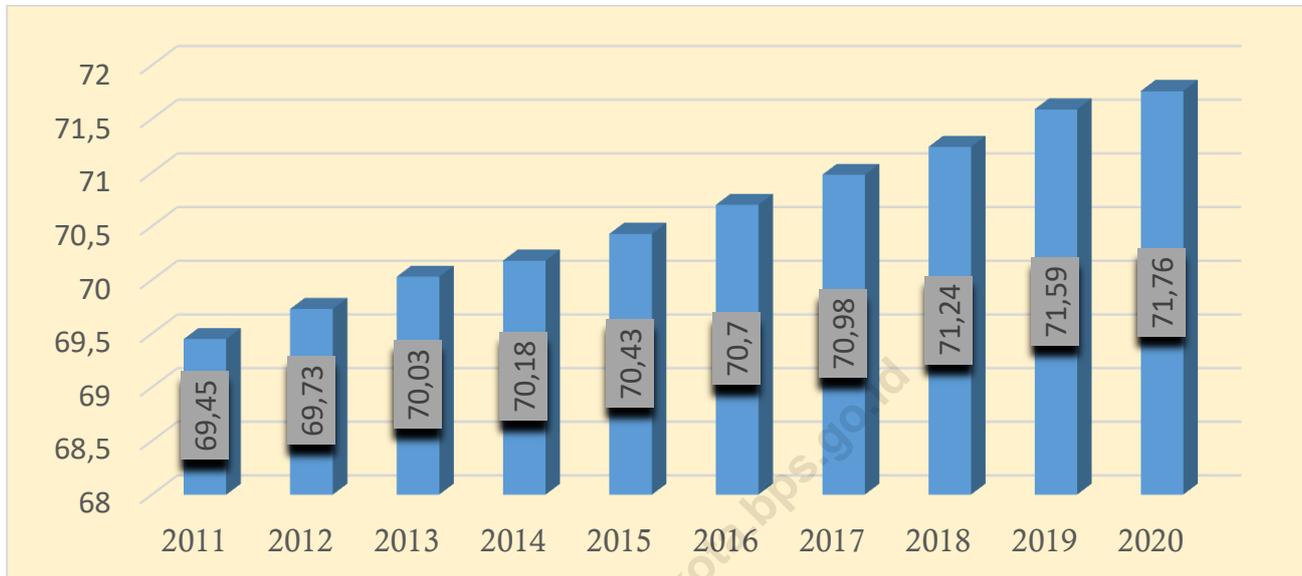
Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia.

Harapan manusia untuk panjang umur adalah dengan hidup sehat. Oleh sebab itu banyak yang mengaitkan rendahnya angka kesakitan dengan tingginya angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduknya. Indikator AHH ini menjadi penting dalam strategi pembangunan kesehatan pemerintah daerah karena indikator ini digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka harapan hidup

yang rendah pada suatu wilayah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya seperti program kesehatan lingkungan, perbaikan gizi dan pengentasan kemiskinan.

Gambar 3

Angka Harapan Hidup Kota Mataram 2011 – 2020 (Tahun)



Sumber: BPS Kota Mataram (diolah)

Angka harapan hidup (AHH) di Kota Mataram dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2020 AHH Kota Mataram sudah mencapai 71,76 tahun, yang mana angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 71,59 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa bayi-bayi yang lahir sekitar tahun 2020 mempunyai harapan untuk melanjutkan hidupnya hingga usia 71 tahun lebih.

Upaya peningkatan kesehatan masyarakat dapat meningkatkan peluang meningkatnya usia harapan hidup di suatu daerah. Umumnya AHH disuatu wilayah yang sedang berkembang cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah yang lebih maju. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi yang tinggi. Umur harapan hidup secara rata-rata sangat ditentukan oleh tingkat kelangsungan hidup penduduk sejak umur muda, yaitu sejak masih bayi dan balita. Turunnya angka kematian ibu dan bayi turut ditunjang oleh kehadiran penolong kelahiran. Adanya penolong kelahiran yang terlatih dan memiliki kemampuan medis yang memadai akan dapat bertindak dengan cepat dan tepat apabila terjadi komplikasi saat proses melahirkan.

05 PENDIDIKAN

02 PENDIDIKAN

<https://mataramkota.bps.go.id>



BAB 5

Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu maka setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas, sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945, dimana berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C ayat 1, dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, dalam Pasal 31 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, dimana UU No.20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Upaya pembangunan khususnya di daerah dapat dipacu dengan mengutamakan pembangunan manusia melalui pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin besar akses dan peluang untuk berkembang dalam era globalisasi yang semakin nyata.

Kebijakan pemerintah dengan Program Wajib Belajar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia (*Human Capital*) yang berkualitas, termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Dengan modal sumber daya manusia yang berkualitas maka kinerja pembangunan juga akan lebih baik. Untuk dapat memperoleh pendidikan yang memadai maka harus ditunjang oleh kemampuan, baik dari Pemerintah maupun masyarakatnya sendiri. Pemerintah harus dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, yang mana jika dilihat sampai saat ini kemampuan pemerintah dalam menyediakan pendidikan gratis bagi warganya masih belum terlaksana secara optimal.

Masih rendahnya kemampuan pemerintah dan masyarakat selalu menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Realita ini senantiasa banyak ditemui di sekeliling kita, yaitu banyak sarana pendidikan yang sangat tidak layak dan juga banyak anak-anak usia sekolah seharusnya belajar, namun sudah harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Di tengah keterbatasan inilah pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar enam tahun pada tahun 1984 dan kemudian diikuti dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun mulai tahun 1994. Kebijakan lain sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat adalah melalui program di luar pendidikan formal, di antaranya melalui sekolah-sekolah program jarak jauh. Program atau kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat sekolah. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan lebih baik dan tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

Pendidikan dan kesejahteraan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan tentunya kecenderungan untuk memiliki pendidikan yang tinggi juga semakin tinggi (Saripudin, 2008). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan, karena pendidikan sangat penting bagi suatu bangsa dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas.

5.1 Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan fasilitas pendidikan merupakan syarat mutlak pembangunan bidang pendidikan. Sebagai wilayah perkotaan, fasilitas pendidikan untuk semua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi berada di Kota Mataram, bahkan banyak pula fasilitas pendidikan yang didirikan oleh pihak swasta dan mutu pendidikannya tetap

terjamin sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas masyarakat Kota Mataram. Selain dari meningkatnya jumlah sekolah, pemerintah juga berusaha meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah. Banyak sekolah telah dibangun agar dapat memenuhi standar pendidikan dan keamanan bagi murid-murid yang belajar.

Tabel 9
Fasilitas Sekolah di Kota Mataram, 2020

Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ampenan	38	11	6	1
Sekarbela	23	10	6	4
Mataram	41	15	10	5
Selaparang	31	11	12	7
Cakranegara	41	6	3	2
Sandubaya	22	15	6	3
Jumlah	196	68	43	22

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram

Berdasarkan Tabel 9 fasilitas sekolah yang paling banyak di Kota Mataram adalah Sekolah Dasar yaitu 196. Kemudian, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 68. Jumlah SMP bahkan kurang dari setengah jumlah SD. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah SMP harus ditambah untuk memenuhi target wajib sekolah 9 tahun.

Bahkan pada tahun 2020 telah ditetapkan program wajib sekolah 12 tahun yang artinya jumlah Sekolah Menengah Atas harus tercukupi untuk menampung sejumlah siswa yang ada. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan upaya untuk mampu memenuhi kebutuhan akan akses pendidikan hingga SMA agar mampu mencapai target wajib sekolah 12 tahun.

5.2 Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan

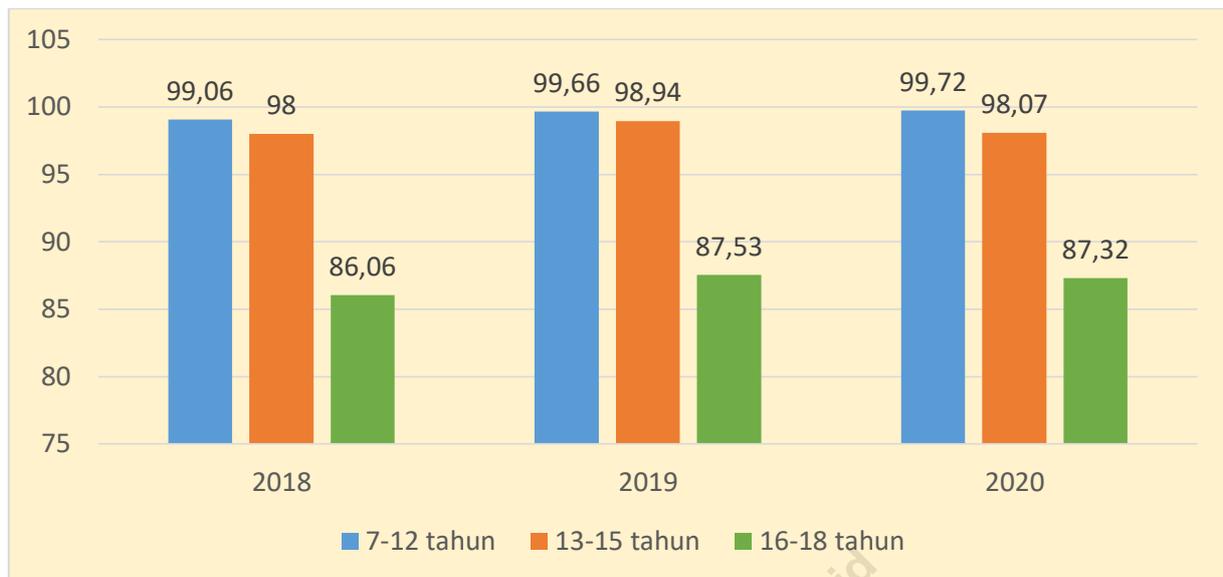
menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Tingkat partisipasi sekolah dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan perbandingan penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu terhadap total penduduk pada umur tersebut. APS dapat menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan. Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan dibidang pendidikan khususnya upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Untuk perhitungan APS, Umur penduduk dibagi ke dalam tiga kelompok tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA. Kelompok pertama 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SLTP, dan kelompok umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SLTA.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang sudah dikenal luas di masyarakat dan kalangan peneliti. APS merupakan perbandingan antara penduduk yang masih bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dengan penduduk di usia sekolah tersebut. Dengan demikian, APS memberikan gambaran akan kesempatan penduduk untuk mengenyam pendidikan. Sejak tahun 2007, pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) juga ikut diperhitungkan. Untuk penghitungan APS, penduduk dikelompokkan dalam kelompok usia sekolah yaitu, SD usia 7 – 12 tahun, SMP usia 13 – 15 tahun dan SMA usia 16 – 18 tahun. Secara umum APS usia SD merupakan yang tertinggi karena mencapai lebih dari 90 persen, dan semakin tinggi tingkat pendidikannya APS nya menjadi semakin rendah. Pada umumnya, partisipasi pendidikan dasar masih cukup tinggi, dan angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Gambar 4

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Mataram Tahun 2018 – 2020

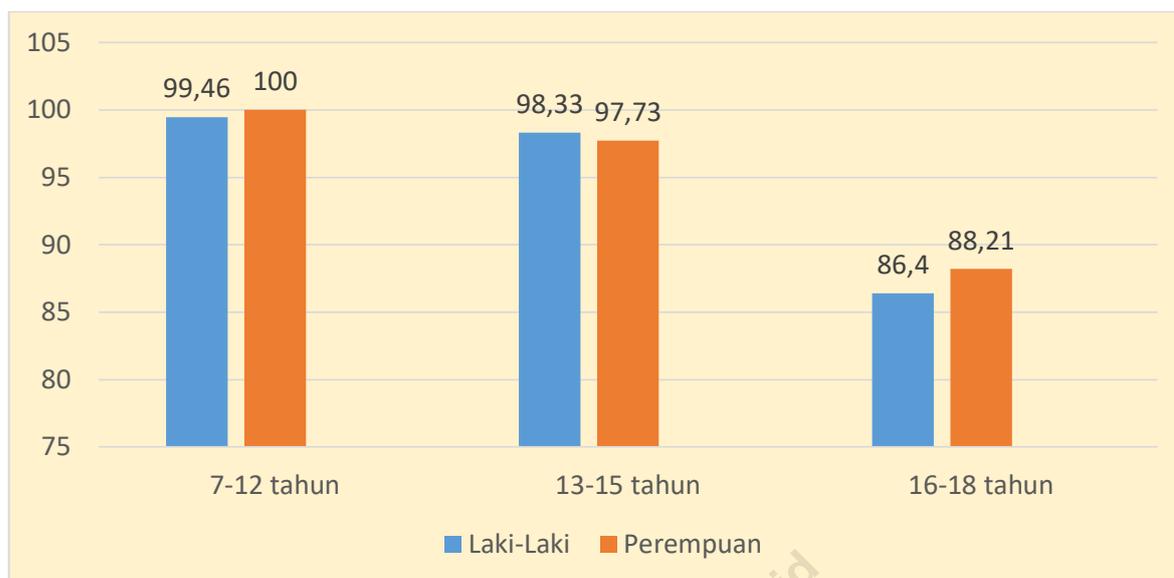


Sumber: BPS Kota Mataram (diolah)

Pada Gambar 4 di atas dapat dilihat bahwa APS pada kelompok umur 7 – 12 tahun selama kurun waktu 2018 – 2020 sudah mencapai angka 99,72 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir semua penduduk usia Sekolah Dasar telah mengenyam jenjang pendidikan dasar. Pada kelompok umur 13 – 15 tahun APS dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan bahkan pada tahun 2019 telah mencapai 98,94 persen walaupun pada Tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi 98,07 persen. Demikian halnya dengan kelompok umur 16 – 18 tahun, dari tahun ke tahun terus meningkat walaupun pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 87,53 persen. APS antar jenjang pendidikan dari SD ke SMA semakin mengecil. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, penduduk yang masih bersekolah pada jenjang tersebut justru makin berkurang. Di Tahun 2020 ini, banyak faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi, diantaranya adalah keadaan sosial ekonomi keluarga dan juga faktor pandemi Covid-19.

Gambar 5

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin di Kota Mataram, 2020



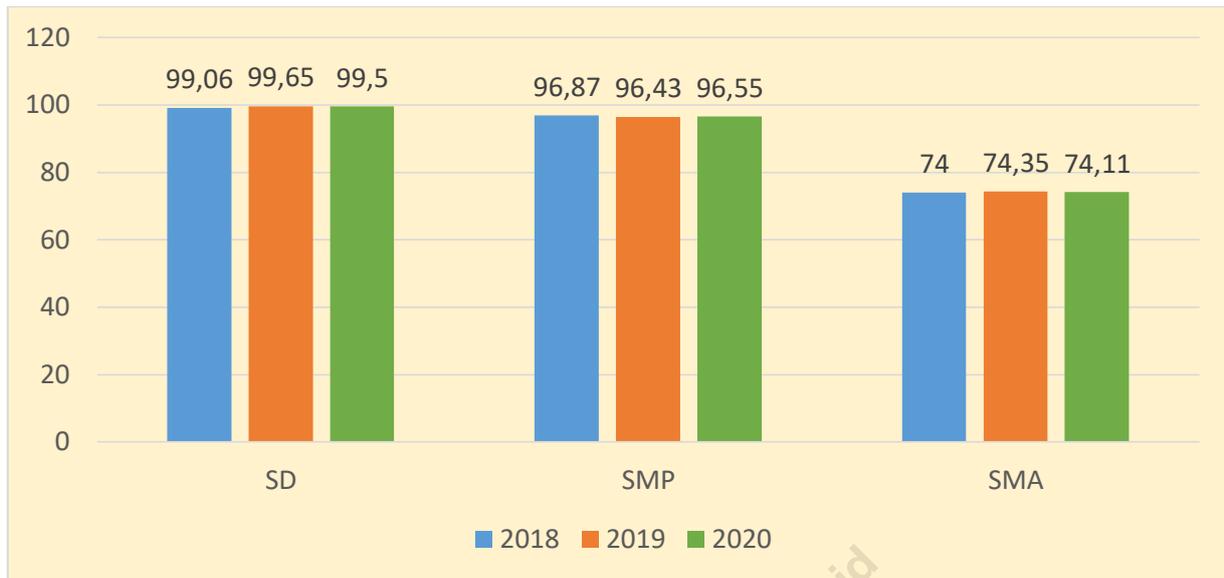
Sumber: BPS Kota Mataram (diolah)

Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan di Kota Mataram nampaknya telah tercapai, hal ini terlihat dari tidak terdapatnya perbedaan jumlah yang signifikan antara penduduk laki-laki maupun perempuan untuk mengenyam bangku sekolah. Hal ini tergambar dari APS di tiga jenjang pendidikan menurut jenis kelamin, dimana APS laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Pada kelompok umur 16 – 18 tahun, APS penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki, hal ini menggambarkan tingginya kesadaran kaum hawa untuk menuntut ilmu.

Indikator lain untuk mengetahui partisipasi penduduk untuk bersekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mengetahui partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. Angka Partisipasi Murni didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa pada usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai yang dinyatakan dalam persentase. APM dibagi menjadi kelompok APM SD untuk penduduk yang berusia 7-12 tahun, APM SMP untuk penduduk yang berusia 13-15 tahun, APM SMA untuk penduduk yang berusia 16-18 tahun.

Gambar 6

Angka Partisipasi Murni Kota Mataram, 2018 – 2020



Sumber: BPS Kota Mataram (diolah)

Tahun 2018-2020 APM SD hampir mencapai angka 100 yaitu 99,06 persen, hal ini berarti hampir semua penduduk usia 7-12 bersekolah di jenjang yang sesuai tepat pada waktunya, sedangkan sisanya bisa disebabkan ada yang memasuki jenjang SD di usia kurang dari 7 tahun atau masih duduk dibangku SD dengan usia lebih dari 12 tahun, atau ada juga penduduk yang sudah tamat SD di usia kurang dari 12 tahun disebabkan mengikuti program akselerasi pendidikan SD. APM SD terus meningkat hingga pada tahun 2019 APM sebesar 99,65 persen. Sedangkan untuk Tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 99,5 persen. Untuk APM SMP pada tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 96,55 persen. Untuk APM SMA pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 74,35 persen.

Masih rendahnya APM SMA tentunya makin menguatkan dorongan untuk perlu digiatkannya program pendidikan dua belas tahun di Kota Mataram. Hal ini menjadi tantangan bagi pemangku kebijakan agar penduduk usia sekolah dapat mengenyam pendidikan secara keseluruhan dan meningkatkan kesejahteraannya di masa depan.

5.3 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan, dengan asumsi pada usia tersebut proses

pendidikan sudah berakhir. Perhitungan MYS/RLS menggunakan acuan umur 25 tahun ke atas mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Gambar 7

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas



Sumber: BPS Kota Mataram (diolah)

Pada tahun 2020, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kota Mataram mencapai 9,46 tahun, artinya jenjang pendidikan penduduk Kota Mataram yang berusia 25 tahun ke atas adalah sampai dengan duduk di kelas 1 SMA. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, maka dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Mataram terus mengalami peningkatan sebagaimana yang terlihat di Gambar 5.5. meskipun demikian, kondisi ini masih jauh dari kata ideal mengingat target RLS maksimum yang ditetapkan UNDP adalah 15 tahun. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas mengenai target terpenuhinya partisipasi sekolah ini oleh penduduk usia sekolah.

06 KETENAGAKERJAAN

<https://mataramkota.bps.go.id>



BAB 6

Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan permasalahan yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Permasalah-permasalahan yang meliputi ketenagakerjaanpun beragam seperti tingginya tingkat pengangguran, masih kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya produktivitas pekerja hingga adanya pekerja anak. Kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri dalam pembangunan di Kota Mataram. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan sendiri merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya. Oleh karena itu pentingnya data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah, terkait dengan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS membagi penduduk menjadi dua yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja sendiri merupakan penduduk yang usianya 15 tahun ke atas. Pengkategorian tidak sampai disitu, selanjutnya penduduk usia kerja dibagi menjadi dua berdasarkan kegiatan utamanya yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk kedalam angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang berasal dari rumah tangga, dan sebagai imbal baliknya balas jasa bagi tenaga kerja berupa upah/gaji akan dipergunakan untuk kesejahteraan rumah tangga. Sehingga jelas baik dari sisi ekonomi maupun sosial, ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa tingginya penduduk usia peroduktif membuat pemerintah dihadapkan pada masalah ketenagakerjaan. Pertumbuhan lapangan pekerjaan seyogyanya sebanding dengan pertumbuhan penduduk, karena jika tidak yang akan terjadi adalah masalah pengangguran dan imbasnya adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kota Mataram maka dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat kesempatan kerja (TKK), tingkat pengangguran dan lapangan pekerjaan.

6.1 Angkatan Kerja

Angkatan kerja (*labour force*) merupakan penduduk usia kerja yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran juga termasuk dalam kategori angkatan kerja. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja.

Gambar 8

Jumlah Angkatan Kerja di Kota Mataram Tahun 2012-2019



Sumber: BPS Kota Mataram (diolah)

Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2017-2020 jumlah angkatan kerja di Kota Mataram mengalami peningkatan.

Tabel 10

Persentase Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Mataram Tahun 2020

Angkatan Kerja	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Bekerja	92,26	94,35	93,17
Tidak Bekerja	7,74	5,65	6,83

Sumber: BPS Kota Mataram (diolah)

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian suatu wilayah. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mencatat bahwa jumlah penduduk usia kerja di Kota Mataram tahun 2020 mencapai kisaran 385.994 ribu jiwa. Sebanyak 93,17 persen dari jumlah tersebut merupakan mereka yang benar-benar memiliki potensi dalam menggerakkan perekonomian, yang disebut angkatan kerja, atau dapat dikatakan 9 dari 10 penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin angkatan kerja perempuan lebih banyak dibanding angkatan kerja laki-laki.

6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu indikator ketenagakerjaan yang paling penting untuk menghitung potensi jumlah tenaga kerja yang tersedia di suatu daerah. TPAK dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang masuk kedalam angkatan kerja (baik bekerja atau menganggur) dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja adalah penduduk yang secara ekonomi berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

Secara umum tingginya TPAK disebabkan oleh tingginya penduduk yang bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Namun apabila tingginya diiringi dengan rendahnya tingkat kesempatan kerja (persentase penduduk yang bekerja), maka hal ini cukup mengkhawatirkan, karena mengindikasikan meningkatnya penduduk yang mencari pekerjaan, yang selanjutnya dapat memicu tingginya angka pengangguran. Apabila TPAK berada di atas 60 persen dapat diartikan bahwa partisipasi

tenaga kerja dalam pasar kerja masih tergolong cukup aktif dalam menggerakkan perekonomian. Jika pasar kerja bisa menyerap semua angkatan kerja dalam lapangan kerja, maka peningkatan TPAK akan memberikan nilai positif bagi perekonomian dan pembangunan wilayah.

Tabel 11
TPAK dan TKK di Kota Mataram 2017-2020

Tahun	TPAK	TKK
(1)	(2)	(3)
2017	64,53	94,65
2018	63,31	93,51
2019	64,87	94,72
2020	68,07	93,17

Sumber: BPS Kota Mataram (diolah)

Pada tahun 2020 TPAK di Kota Mataram adalah 68,07 persen, artinya sebanyak 68,07 persen penduduk usia kerja di Kota Mataram siap terjun dalam pasar kerja, baik itu yang sudah bekerja atau yang mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus pengangguran.

Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 adalah 385.944 ribu jiwa. Sebanyak 68,07 persen dari jumlah tersebut merupakan mereka yang benar-benar memiliki potensi dalam menggerakkan perekonomian, yang disebut angkatan kerja, atau dapat dikatakan 68 dari 100 penduduk usia kerja merupakan Angkatan Kerja.

TPAK pada tahun 2020 menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak diikuti dengan kenaikan nilai TKK (Tingkat Kesempatan Kerja). Menurunnya angka TKK merupakan indikasi bahwa tingkat pengangguran bertambah. Semakin kecil daya serap angkatan kerja maka proporsi pengangguran terbuka semakin besar nilainya, begitu juga sebaliknya.

6.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari sisi ekonomi pengangguran merupakan produk ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pengangguran akan terjadi apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dibandingkan jumlah pencari kerjanya, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan informasi pasar kerja bagi pencari kerja kurang lengkap.

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) biasanya digunakan untuk mengetahui besarnya potensi angkatan kerja yang belum tersalurkan atau belum memiliki pekerjaan.

Angka TPT yang tinggi pada suatu daerah akan menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Oleh karena itu indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.

Tingkat Pengangguran terbuka di Kota Mataram pada tahun 2020 sebesar 6,83 persen atau dapat dikatakan 7 dari 100 penduduk di Kota Mataram merupakan pengangguran. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 2019 yang sebesar 5,28 persen. Meningkatnya angka TPT ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja yang ada di Kota Mataram menurun.

Tabel 12

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Mataram Tahun 2017 – 2020 (Persen)



Sumber: BPS Kota Mataram (diolah)

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2017-2020 TPT di Kota Mataram mengalami fluktuasi. Namun, pada tahun 2020 TPT di Kota Mataram mengalami kenaikan hal ini dikarenakan adanya masa pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Tahun 2020 yang membuat banyak usaha mengalami kesulitan sehingga menimbulkan kenaikan angka pengangguran. Angka TPT tertinggi pada gambar terjadi pada tahun 2020 yaitu 6,83 persen sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,28 persen.

Daerah yang memiliki TPT di bawah 6 – 7 persen dikatakan daerah yang penganggurannya normal dan bisa disebut daerah full employment, Kota Mataram selalu berada pada posisi full employment sejak tahun 2011-2020 kecuali pada tahun 2015.

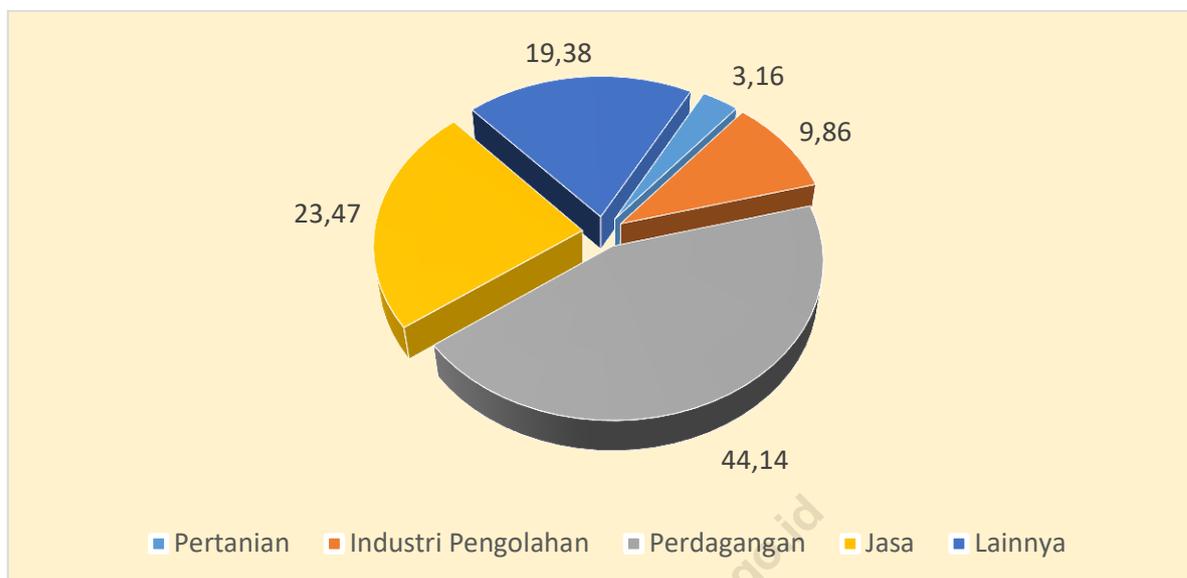
6.4 Lapangan Pekerjaan

Potensi dari sektor-sektor yang ada dalam perekonomian dapat tercermin dari besarnya penduduk yang bekerja dalam sektor-sektor tersebut. Lapangan pekerjaan yang menyerap penduduk bekerja memiliki berbagai variasi.

Pasar tenaga kerja di Kota Mataram masih didominasi oleh dua lapangan usaha, yakni perdagangan dan jasa-jasa. Kedua lapangan usaha tersebut menyerap lebih dari 60 persen tenaga kerja di Kota Mataram. Tahun 2020, tercatat 44,14 persen tenaga kerja di Kota Mataram menekuni profesi di sektor perdagangan, baik sebagai pengusaha, buruh/karyawan, pekerja bebas, maupun pekerja keluarga. Sementara itu posisi kedua diduduki oleh sektor jasa-jasa yang menyerap 23,47 persen tenaga kerja. Sebaliknya, lapangan usaha pertanian merupakan lapangan usaha dengan serapan tenaga kerja paling kecil, yaitu hanya sebesar 3,16 persen. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa potensi pertanian Kota Mataram terhadap perekonomian memang kecil jika dibandingkan lapangan usaha yang lain.

Gambar 9

Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Mataram Tahun 2020



Sumber: BPS Kota Mataram (diolah)

<https://mataramkota.bps.go.id>



07

**KEMISKINAN DAN
POLA KONSUMSI**

<https://masyarakat.go.id>



BAB 7

Kemiskinan dan Pola Konsumsi

Kemiskinan adalah masalah kompleks dan bersifat multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga sosial budaya dan lainnya. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap daerah, termasuk Kota Mataram.

Pengentasan kemiskinan menjadi fokus pertama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Faktor yang dapat memengaruhi terjadinya kemiskinan antara lain pendapatan, pendidikan, geografis, dan lain-lain. Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri.

Tingkat kemiskinan menjadi tolok ukur kesejahteraan penduduk, dimana semakin tinggi kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan yang semakin memburuk dan semakin rendah kemiskinan mencerminkan kesejahteraan yang semakin membaik. Salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga adalah pola konsumsi rumah tangga. Besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga dikatakan sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-makanan.

7.1. Perkembangan Penduduk Miskin

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*) makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga yang dikatakan sebagai penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM dilihat dari nilai pengeluaran

kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari, sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Gambar 10

Persentase Penduduk Miskin di Kota Mataram Tahun 2013 – 2020



Sumber: BPS Kota Mataram

Selama 8 tahun terakhir hingga 2020 tercatat persentase penduduk miskin di Kota Mataram terus mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan sejak tahun 2016 sampai 2020, persentasenya selalu berada dibawah angka 10 persen. Jumlah ini semakin menurun hingga pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,47 persen.

Sementara itu, seperti yang terlihat dalam Tabel 13, jumlah penduduk miskin di Kota Mataram pada tahun 2020 sebesar 41.800 jiwa atau berkurang sekitar 1.390 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun persentase penduduk miskin pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,45 persen poin dibanding tahun 2019. Penurunan persentase penduduk miskin ini tidak lepas dari peran serta semua pihak termasuk Pemerintah Kota Mataram melalui berbagai program pengentasan kemiskinan.

Tabel 13

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Mataram, 2018-2020

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
(1)	(2)	(3)
2018	8,96	42.600
2019	8,92	43.190
2020	8,47	41.800

Sumber: BPS Kota Mataram (Susenas)

7.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga tingkat kedalaman kemiskinan dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kebijakan kemiskinan sebaiknya tidak hanya ditujukan untuk mengurangi persentase penduduk miskin saja, namun juga dapat mengurangi kedalaman kemiskinan sekaligus keparahannya. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan maka artinya kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Seperti yang terlihat pada gambar 11, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kota Mataram sejak periode 2012 hingga 2019 bersifat fluktuatif. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 2,05 kemudian P_1 paling rendah tahun 2018 sebesar 1,17. Secara umum dapat dikatakan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kota Mataram selama kurun waktu 2010 – 2019 memiliki *trend* yang menurun.

Gambar 11

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Mataram Tahun 2013– 2020



Sumber: BPS Kota Mataram

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kota Mataram pada tahun 2020 menunjukkan angka 1,86. Nilai ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya yaitu 1,55. Hal ini belum menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menurunkan persentase penduduk miskin secara signifikan pada tahun 2020. Selain itu, meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan memberikan makna bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Masih diperlukan program bantuan sosial yang tepat sasaran dan program pengentasan kemiskinan lainnya yang dapat mengangkat penduduk miskin keluar dari kemiskinan secara permanen.

7.3. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks keparahan kemiskinan maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya. Semakin tinggi nilai indeks maka akan semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin satu dengan lainnya. Oleh karena itu, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Dimensi penyebaran pengeluaran/pendapatan atau ketimpangan dari penduduk miskin perlu dilihat sebagai

gambaran parah tidaknya kehidupan penduduk miskin, hal ini dikarenakan semakin timpang penduduk miskin maka akan semakin sulit untuk mengentaskan diri dari kemiskinan. Apabila kesenjangan antara penduduk miskin tidak jauh berbeda maka kebijakan yang sama akan dapat berefek sama bagi penduduk miskin tersebut. Meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan semakin rendahnya kualitas penduduk miskin.

Pada gambar 12 terlihat bahwa selama tahun 2013 hingga 2020, Kota Mataram memiliki Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) yang bersifat fluktuatif. Dimana nilai P_2 tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,56 dan nilai P_2 terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,22. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan P_2 sebesar 0,11 poin dibanding tahun 2019, dimana Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Mataram tahun 2020 menjadi 0,56. Dengan meningkatnya angka Indeks Keparahan Kemiskinan ini maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin melebar, atau dengan kata lain makin meningkat pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 12

Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Mataram, 2013-2020



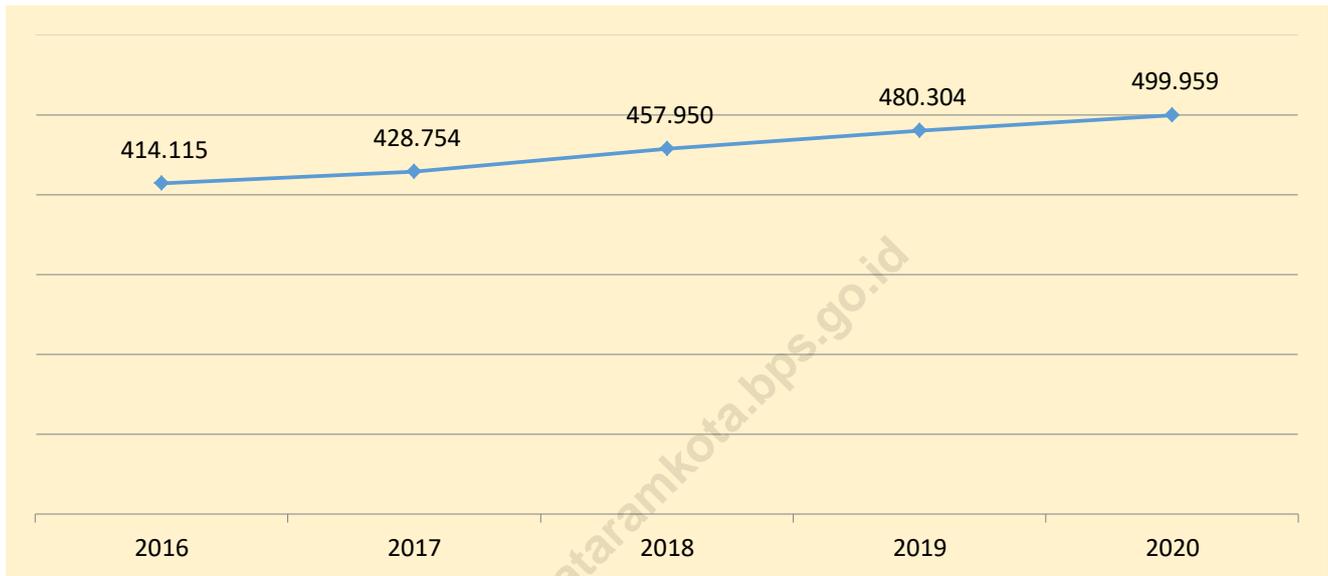
Sumber: BPS Kota Mataram

7.4. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Apabila penduduk memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan maka dikelompokkan menjadi penduduk miskin dan jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di atas garis kemiskinan maka dikelompokkan

menjadi penduduk tidak miskin. Sedangkan, penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan merupakan kasus batas yang dikategorikan sebagai penduduk yang rentan miskin. Penduduk rentan miskin ini akan mudah naik menjadi tidak miskin namun juga akan mudah jatuh menjadi miskin. Apabila terjadi sedikit gejolak ekonomi maka penduduk rentan miskin akan berkontribusi pada besarnya penduduk miskin.

Gambar 13
Garis Kemiskinan di Kota Mataram, 2016 – 2020



Sumber: BPS Kota Mataram

Garis Kemiskinan (GK) yang merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Nilai garis kemiskinan memengaruhi kenaikan atau penurunan penduduk miskin di suatu daerah. Seperti yang terlihat pada gambar 13, Garis Kemiskinan di Kota Mataram dari tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi antara tahun 2017-2018 yaitu sebesar 29.196 Rp/kapita/bulan. Pada tahun 2018 garis kemiskinan di

Kota Mataram sebesar 457.950 Rp/kapita/bulan, lalu meningkat sebesar 22.354 Rp/kapita/bulan menjadi 480.304 Rp/kapita/bulan di tahun 2019 dan di Tahun 2020 meningkat kembali sebesar 19.655 Rp/kapita/bulan menjadi 499.959 Rp/kapita/bulan. Meningkatnya garis kemiskinan dapat dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Garis kemiskinan di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan. Hal ini disebabkan karena nilai rupiah yang harus dibelanjakan penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan.

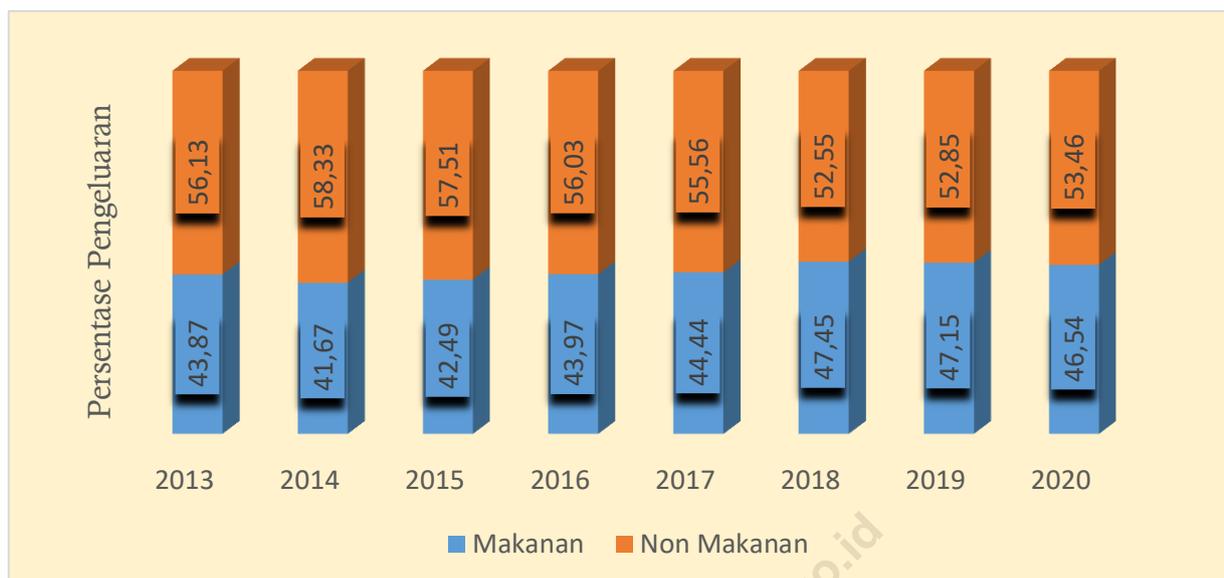
7.5. Pola Konsumsi

Pola konsumsi bisa diartikan sebagai jumlah persentase dari distribusi pendapatan terhadap masing-masing pengeluaran pangan, sandang, jasa-jasa serta rekreasi dan hiburan. Secara umum, besarnya pengeluaran akan berbanding lurus dengan besarnya pendapatan yang diterima. Data pendapatan rumah tangga yang akurat relatif sulit diperoleh, dikarenakan biasanya rumah tangga akan jauh lebih mudah menceritakan besarnya pengeluaran per bulan dari pada memberitahu jumlah pendapatan yang diterima setiap bulannya. Berdasarkan kenyataan ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, digunakan pendekatan pengeluaran sebagai alternatif dari akumulasi pendapatan yang diterima. Besarnya pendapatan yang diterima diharapkan dapat mencerminkan dengan besarnya pengeluaran yang dibelanjakan oleh rumah tangga.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Gambar 14

Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk Kota Mataram Tahun 2013 – 2020



Sumber: BPS Kota Mataram

Pada gambar 14 terlihat bahwa dari tahun 2013 hingga 2020, persentase pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan penduduk Kota Mataram bersifat fluktuatif dan untuk setiap tahunnya, persentase terbesar didominasi oleh pengeluaran non makanan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Mataram dapat dikatakan sejahtera, karena apabila penduduk yang tingkat konsumsinya sudah mencapai titik jenuh, maka pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanannya.

Sementara itu, untuk tahun 2020 persentase terbesar adalah pengeluaran non makanan sebesar 53,46 persen. Angka ini meningkat sebesar 0,61 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran makanan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 46,54 persen. Sehingga menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Mataram pada tahun 2020 mengalami peningkatan.



08

PERUMAHAN

<https://matawanita.bps.go.id>



BAB 8

Perumahan

Rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia, selain sandang dan pangan. Rumah utamanya digunakan sebagai tempat tinggal dan berfungsi untuk melindungi diri dari hujan dan panas, serta sebagai tempat perlindungan dari binatang buas dan keganasan alam lainnya. Selain itu, rumah juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Sampai saat ini permintaan akan rumah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Namun, lahan untuk pemukiman masih terbatas dan penawaran perumahan yang hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu menyebabkan sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah belum dapat memenuhi kebutuhan perumahannya.

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan lainnya yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman, salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah perumahan. Kualitas perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi dan menunjukkan kemampuan sosial ekonomi yang semakin meningkat. Begitu pula dengan status sosial seseorang berhubungan dengan kualitas rumah dan lingkungannya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan yang sehat, aman, lestari dan berkelanjutan sesuai dengan Kepmen No.9 tahun 1999 diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis. Komponen perumahan seperti penguasaan tempat tinggal, kualitas tempat tinggal, dan fasilitas-fasilitas penunjang lain (fasilitas air minum, fasilitas buang air besar, sumber penerangan, dan lain-lain) yang baik dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan juga tingkat kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat.

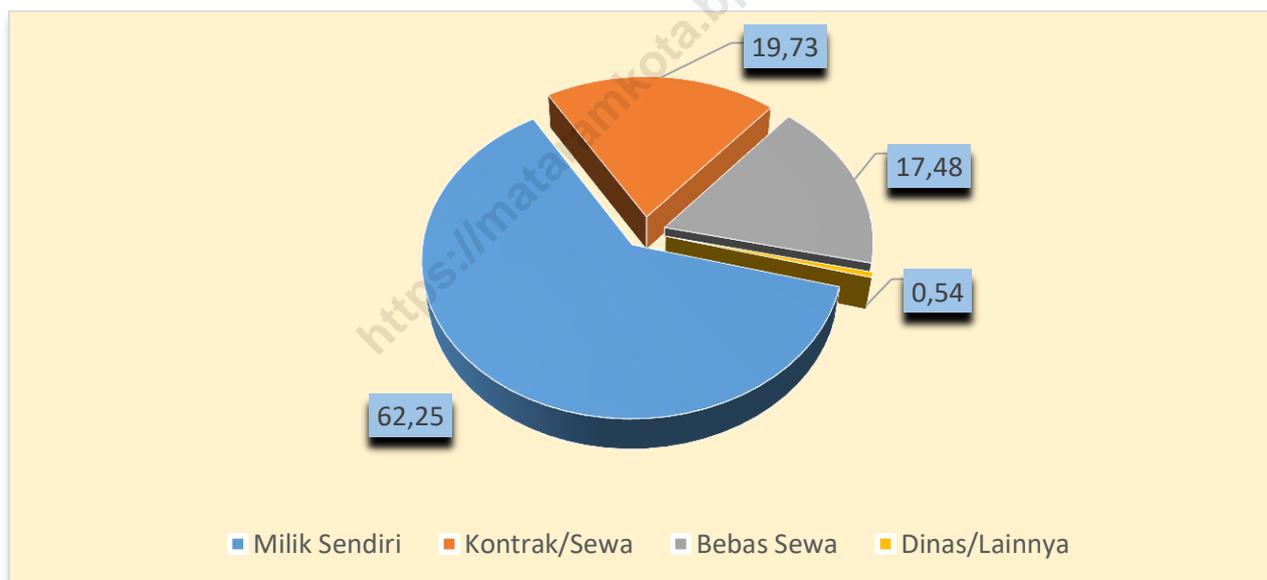
8.1 Status Penguasaan Tempat Tinggal

Tempat tinggal adalah kebutuhan mendasar bagi kehidupan setiap individu/rumah tangga. Namun, tidak semua orang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan tersebut. Faktor ekonomi berpengaruh besar dalam hal tersebut, dimana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan memiliki kesempatan untuk mempunyai tempat tinggal layak huni dengan lebih mudah. Sehingga status penguasaan tempat tinggal/kepemilikan rumah dapat dijadikan salah satu gambaran kondisi kesejahteraan penduduk.

Status penguasaan tempat tinggal dapat dibedakan menjadi status milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dan dinas/lainnya. Status penguasaan tempat tinggal berupa milik sendiri dapat mencerminkan tingginya tingkat ekonomi atau kesejahteraan sebuah rumah tangga bila dibandingkan dengan status penguasaan bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri (seperti kontrak/sewa, bebas sewa, dan dinas/lainnya).

Gambar 15

Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Rumah



Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Mayoritas rumah tangga di Kota Mataram sudah memiliki rumah dengan status milik sendiri yaitu sebesar 62,25 persen di tahun 2020. Kemudian diikuti dengan status kontrak/sewa sebesar 19,73 persen, bebas sewa sebesar 17,48 persen, dan sisanya 0,54 persen mendiami rumah dinas/lainnya, seperti yang terlihat pada gambar 15. Masih tingginya persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah milik sendiri inilah yang seringkali digunakan sebagai acuan dalam target penyediaan rumah di Kota Mataram.

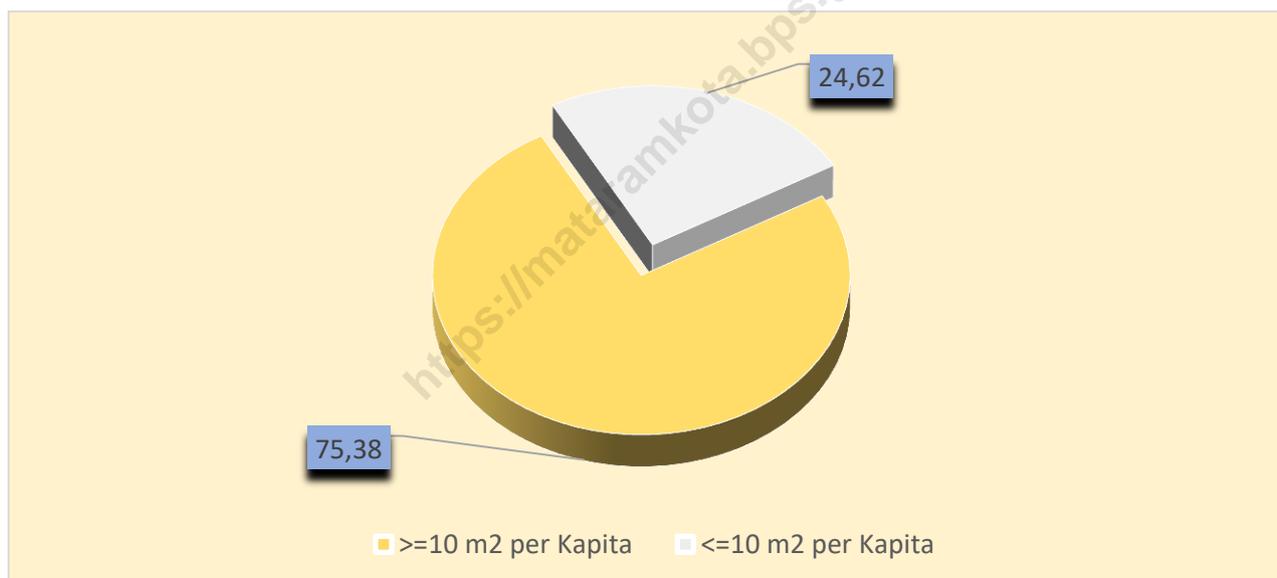
8.2 Kualitas Tempat Tinggal

Beberapa kriteria untuk mengetahui kualitas tempat tinggal meliputi jenis lantai, atap, dinding, dan luas lantai terluas yang digunakan. Apabila suatu rumah tangga menggunakan jenis lantai bukan tanah, jenis dinding tembok, jenis atap berupa asbes/seng/genteng/beton, serta memiliki lantai dengan luas minimal 10 m² perkapita maka dapat dikatakan kualitas tempat tinggal tersebut telah baik/layak.

Kualitas tempat tinggal yang baik penting untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan menjamin kesehatan bagi penghuni tempat tinggal tersebut. Kualitas ini pula dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan kualitas tempat tinggal yang lebih baik/layak cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang meningkat/lebih baik.

Gambar 16

Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Hunian Perkapita



Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

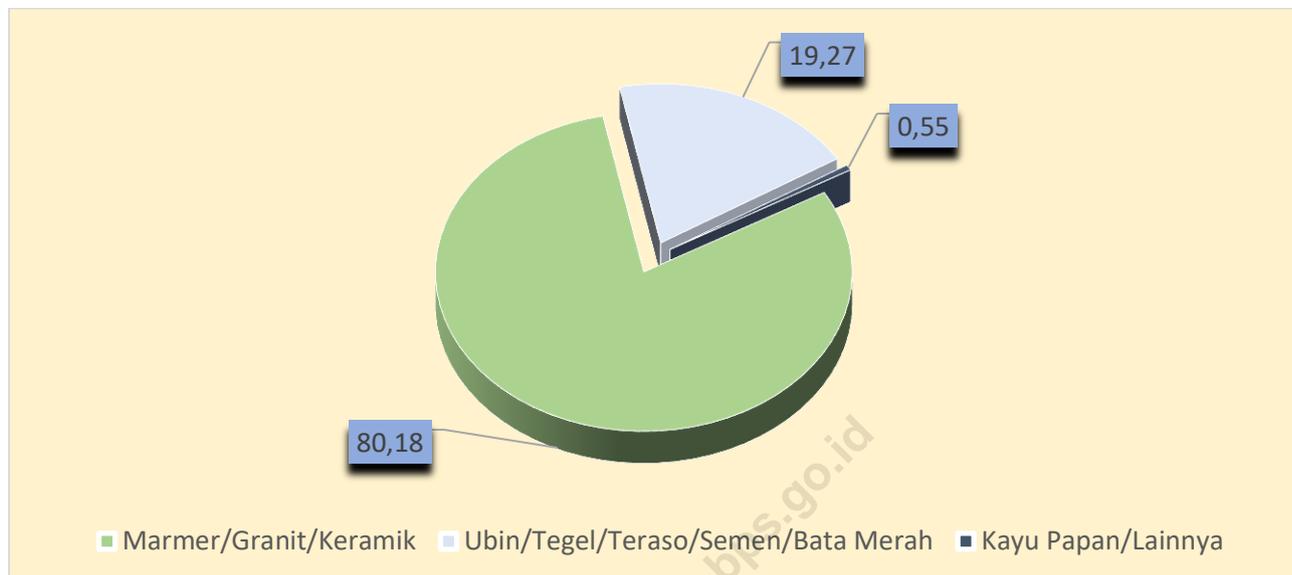
Pada tahun 2020, mayoritas rumah tangga di Kota Mataram memiliki luas lantai minimal 10 m² perkapita mencapai 75,38 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan okupansi atau ruang gerak setiap orang dalam tempat tinggalnya cukup terpenuhi. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas rumah di Kota Mataram semakin meningkat kelayakannya dilihat dari sisi luas per kapita.

Seperti yang terlihat pada gambar 16, secara umum sebagian besar rumah tangga di Kota Mataram menempati rumah dengan jenis lantai terluas terbuat dari marmer/granit/keramik

dengan persentase sebesar 80,18 persen. Diikuti dengan jenis ubin/tegel/semen/bata merah sebesar 29,22 persen, dan sisanya menggunakan kayu/papan dan lainnya.

Gambar 17

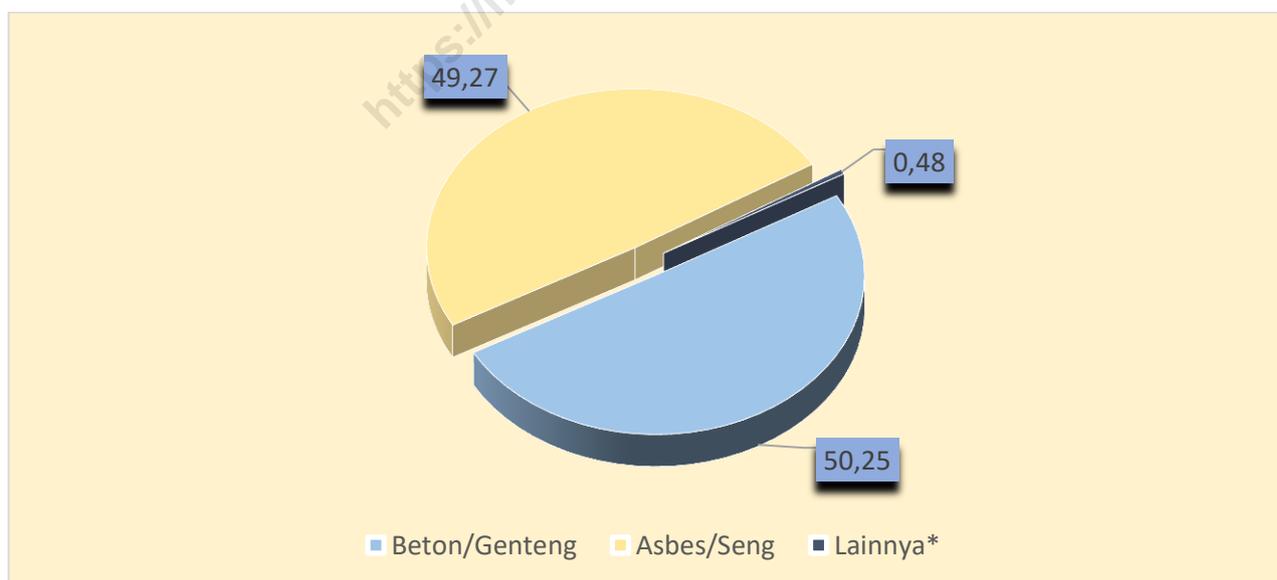
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas



Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Gambar 18

Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas



Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

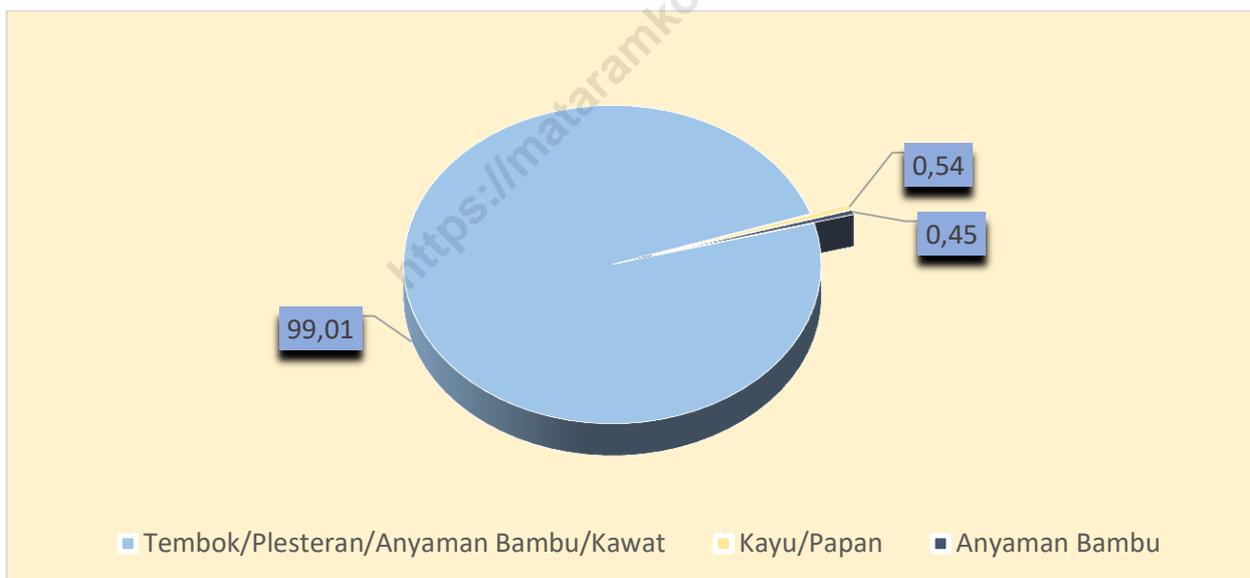
Keterangan: *Jenis atap lainnya seperti bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia, dan yang tidak tergolong ke dalam jenis yang ada.

Jenis atap yang digunakan oleh rumah tangga di Kota Mataram mayoritas berupa beton/genteng (50,25 persen) dan asbes/seng (49,27 persen). Selain itu masih ada rumah tangga ubin/tegel/teraso/semén/bata merah dengan persentase sebesar 19,27 persen. Sedangkan yang menggunakan jenis lainnya seperti bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia besarannya sangat kecil yaitu sebesar 0,55 persen saja.

Kualitas lantai dan atap juga perlu didukung oleh kualitas dinding yang baik. Material pembangun dinding juga memiliki andil dalam keamanan dan kesehatan penduduk. Dinding yang terbuat dari tembok merupakan yang direkomendasikan agar rumah menjadi layak huni. Berdasarkan informasi dari gambar 18, terlihat bahwa pada tahun 2020 sebanyak 99,01 persen atau hampir seluruh rumah tangga di Kota Mataram sudah menggunakan dinding berupa tembok/plesteran anyaman bambu/ kawat. Sedangkan sisanya menggunakan jenis dinding dari kayu/papan, anyaman bambu, dan lainnya yang masing-masing memiliki persentase yang sangat kecil.

Gambar 19

Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas



Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Keterangan: *Jenis dinding lainnya seperti batang kayu, bambu, seng, kardus, dan yang tidak tergolong ke dalam jenis yang ada.

Dapat dilihat bahwa secara umum, kondisi perumahan di Kota Mataram relatif sudah baik. Hampir sebagian besar rumah tangga menempati tempat tinggal yang memenuhi kriteria

kondisi rumah layak, antara lain berdinding tembok, berlantai bukan tanah, serta beratap beton/genteng/asbes/seng.

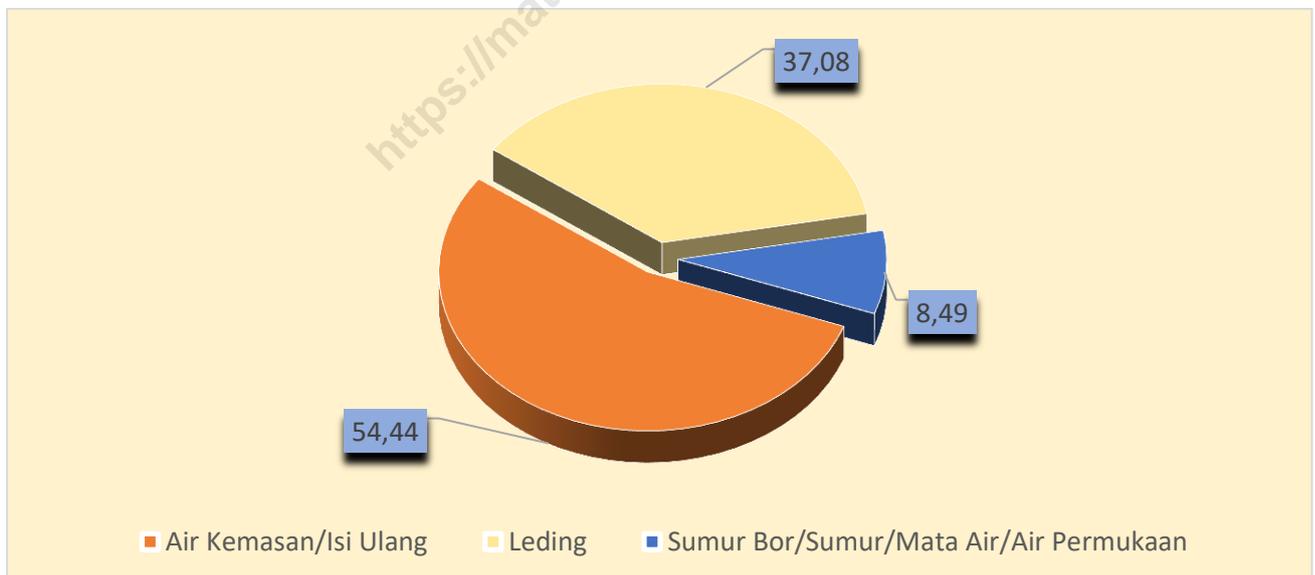
8.3 Fasilitas Air Minum

Selain kondisi rumah yang layak, dibutuhkan ketersediaan fasilitas perumahan yang layak pula. Di antaranya meliputi kepemilikan fasilitas air minum, kepemilikan fasilitas buang air besar, dan sumber penerangan utama yang digunakan. Fasilitas perumahan yang digunakan oleh rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah serta kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Salah satu kebutuhan vital bagi makhluk hidup khususnya dalam rumah tangga adalah air. Bagi rumah tangga, air biasanya digunakan untuk masak, minum, mandi, cuci, dan lain-lain. Tuntutan dalam fasilitas air minum tidak hanya pada upaya ketersediannya, melainkan juga air yang bersih dan *higienes* (layak). Air minum yang layak dikonsumsi/ digunakan sangat ditentukan oleh sumbernya.

Gambar 20

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama



Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Sumber air minum yang digunakan rumah tangga di Kota Mataram cukup beragam yaitu air kemasan/isi ulang, leding, dan sumur bor/sumur/mata air/ air permukaan. Dari gambar 20 terlihat bahwa lebih dari 50 persen rumah tangga di Kota Mataram pada tahun

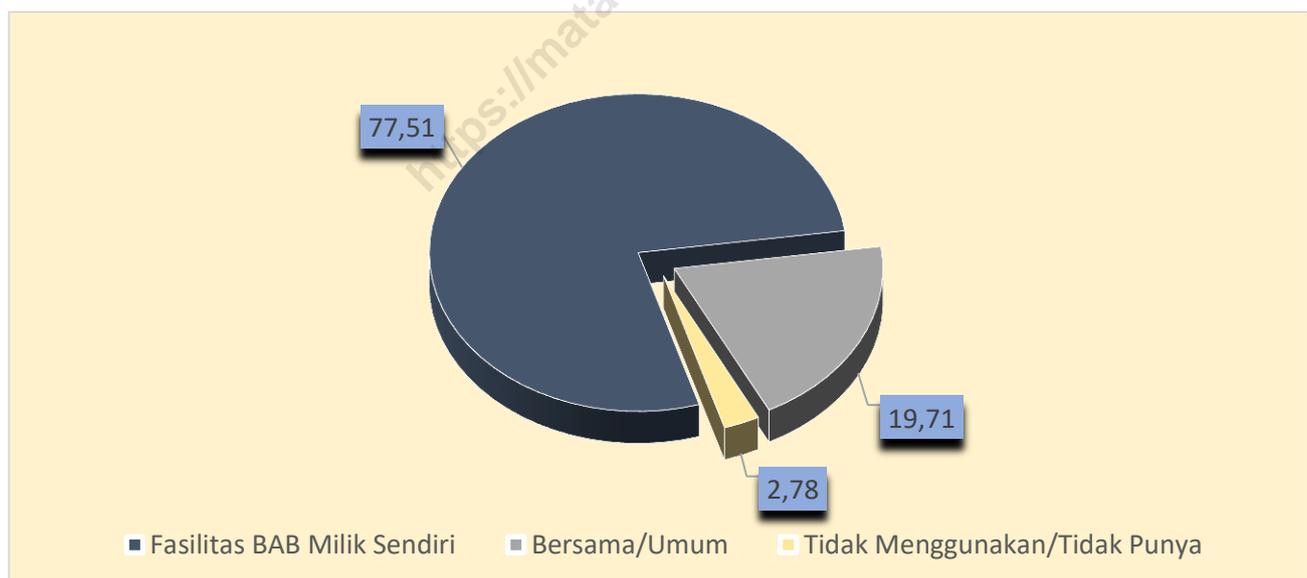
2020 menggunakan air kemasan bermerk/isi ulang sebagai sumber air minum utamanya. Persentase sumber air minum terbesar kedua yang digunakan masyarakat Kota Mataram adalah leding yaitu sebesar 37,08 persen. Selain itu masih ada sebagian kecil rumah tangga (8,49 persen) yang menggunakan sumur bor/sumur/mata air/air permukaan. Sumber air minum yang digunakan ini akan berpengaruh pula terhadap derajat kesehatan penduduk.

8.4 Fasilitas Buang Air Besar

Cerminan kesejahteraan rakyat yang semakin baik terlihat pada kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menjaga lingkungan. Salah satu ukuran yang dapat menunjukkan keadaan ini adalah dalam fasilitas buang air besar. Fasilitas ini merupakan salah satu syarat penting bagi sanitasi dalam rumah. Tempat buang air besar yang baik yaitu kakus dengan penampungan akhir berupa tangki septik, karena dapat menahan rembesan buangan air kotor maupun limbah ke dalam sumber air minum yang digunakan, yang dapat menurunkan kualitas air untuk keperluan rumah tangga.

Gambar 21

Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan



Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Kesadaran penduduk akan pentingnya keberadaan fasilitas BAB sudah tergolong baik. Hal ini terbukti dari persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB sendiri yang mencapai 77,51 persen pada tahun 2020. Sedangkan persentase rumah tangga yang tidak

menggunakan/tidak mempunyai fasilitas BAB di Kota Mataram termasuk kecil yaitu sebesar 2,78 persen. Selain itu, seperti yang terlihat pada gambar 21, terdapat sebesar 19,71 persen rumah tangga di Kota Mataram memiliki fasilitas BAB yang digunakan secara bersama atau untuk umum.

8.5 Sumber Penerangan

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Listrik merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia untuk penerangan maupun untuk keperluan lainnya misalnya untuk memasak, atau yang menggunakan peralatan elektronik lainnya. Seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 22

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama



Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Keberadaan listrik menjadi faktor yang memengaruhi masyarakat dalam memilih lokasi hunian (Serlin M. dan Umilia E., 2013). Pada tahun 2020 hampir semua rumah tangga di Kota Mataram telah menikmati listrik PLN. Gambar 22 menunjukkan bahwa sejumlah 92,95 persen rumah tangga di Kota Mataram telah menggunakan listrik PLN dengan meteran,

sedangkan 6,86 persen masih menggunakan listrik PLN tanpa meteran. Tetapi masih ada sebagian sangat kecil yang masih menggunakan sumber penerangan Non-PLN dan Bukan Listrik yang masing-masing berjumlah 0,11 persen dan 0,008 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Mataram telah memiliki fasilitas penerangan yang baik.

<https://mataramkota.bps.go.id>



LAMPIRAN

<https://mata.pustaka.bps.go.id>



Lampiran 1. RSE Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin, 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 9	7,259	5,623	4,759
10 - 19	6,706	6,150	4,405
20 - 29	10,917	7,271	7,292
30 - 39	8,965	6,560	6,254
40 - 49	7,808	7,325	5,826
50 - 59	9,022	9,207	7,423
60 +	12,322	10,125	9,787
Kota Mataram	-	-	-

Lampiran 2. RSE Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2020

Karakteristik	Kelompok Umur			Jumlah
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	5,921	2,083	15,503	-
Perempuan	5,593	1,978	12,656	-
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	4,639	1,868	18,820	-
40 Persen Tengah	6,036	2,116	17,075	-
20 Persen Teratas	11,015	2,855	23,022	-
Kota Mataram	3,978	1,369	12,354	-

Lampiran 3. RSE Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2020

Karakteristik	Status Perkawinan			Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	4,321	3,878	16,423	-
Perempuan	4,710	3,686	8,641	-
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	4,410	3,528	14,135	-
40 Persen Tengah	5,632	5,613	14,227	-
20 Persen Teratas	5,141	4,566	14,607	-
Pendidikan Tertinggi				
SD ke bawah	5,467	4,711	9,136	-
SMP ke atas	4,465	3,986	11,812	-
Kota Mataram	3,304	2,915	8,195	-

*) Termasuk cerai hidup dan cerai mati

Lampiran 4. RSE Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2020

Karakteristik	Status Perkawinan			Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	5,790	6,114	23,481	-
Perempuan	6,129	4,435	17,259	-
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	7,651	5,612	26,151	-
40 Persen Tengah	7,197	7,652	23,426	-
20 Persen Teratas	7,746	8,805	22,233	-
Pendidikan Tertinggi				
SD ke bawah	10,748	5,651	21,571	-
SMP ke atas	4,820	4,909	18,550	-
Kota Mataram	4,787	4,348	15,528	-

*) Termasuk cerai hidup dan cerai mati

Lampiran 5. RSE Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2020

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin						
Laki-laki	15,371	9,313	13,448	18,334	2,929	-
Perempuan	11,217	10,162	16,107	13,238	2,990	-
Kelompok Pengeluaran						
40 Persen Terbawah	10,872	8,437	16,211	11,774	3,228	-
40 Persen Tengah	13,792	8,769	16,325	18,576	3,857	-
20 Persen Teratas	23,615	17,801	26,974	17,498	4,114	-
Kota Mataram	9,348	6,412	10,505	11,119	2,169	-

Lampiran 6. RSE Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2020

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin						
Laki-laki	100,493	9,618	13,802	17,046	11,407	-
Perempuan	99,829	9,328	16,654	11,425	11,551	-
Kelompok Pengeluaran						
40 Persen Terbawah	100,443	7,810	15,388	11,309	11,396	-
40 Persen Tengah	NA	10,357	18,138	15,042	13,240	-
20 Persen Teratas	101,790	16,309	24,719	15,963	25,493	-
Kota Mataram	71,171	6,659	10,913	9,723	8,654	-

Lampiran 7. RSE Angka Partispasi Sekolah (APS), Angka Partispasi Murni (APM), Angka Partispasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2020

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
APS			
7 – 12 tahun	0,543	-	0,279
13 – 15 tahun	1,692	2,324	1,947
16 – 18 tahun	5,737	5,218	3,633
APM			
SD	0,543	0,455	0,358
SMP	3,226	2,324	2,515
SMA	7,981	9,081	5,647

Lampiran 8. RSE Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2020

Karakteristik	Tidak Punya Ijazah SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	13,189	10,482	8,996	5,710
Perempuan	10,329	11,285	8,318	5,197
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	10,230	9,560	7,913	7,816
40 Persen Tengah	13,572	13,665	11,475	5,950
20 Persen Teratas	25,799	19,746	15,248	3,215
Kota Mataram	10,525	8,876	6,570	4,907

Lampiran 9. RSE Angka Kesakitan menurut Karakteristik, 2020

Karakteristik	Angka Kesakitan
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	8,870
Perempuan	9,873
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	9,769
40 Persen Tengah	8,467
20 Persen Teratas	17,467
Kota Mataram	7,473

Lampiran 10. RSE Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2020

Karakteristik	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar		Jumlah
	Sendiri	Lainnya*	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin KRT			
Laki-laki	3,310	11,212	-
Perempuan	4,717	17,140	-
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	7,163	11,954	-
40 Persen Tengah	3,432	15,289	-
20 Persen Teratas	3,188	28,012	-
Pendidikan Tertinggi KRT			
SD ke bawah	6,282	12,797	-
SMP ke atas	2,646	12,859	-
Kota Mataram	2,998	10,333	-

*Lainnya termasuk fasilitas bersama, MCK Umum, dan tidak ada/tidak menggunakan fasilitas buang air besar.

Lampiran 11. RSE Persentase Rumah Tangga* menurut Karakteristik dan Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga, 2020

Karakteristik	Jenis Kloset		Jumlah
	Leher Angsa	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin KRT			
Laki-laki	-	NA	-
Perempuan	0,362	100,516	-
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	0,294	99,725	-
40 Persen Tengah	-	NA	-
20 Persen Teratas	-	NA	-
Pendidikan Tertinggi KRT			
SD ke bawah	0,276	98,918	-
SMP ke atas	-	NA	-
Kota Mataram	0,091	99,715	-

* Rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar dengan penggunaan sendiri atau bersama.

Lampiran 12. RSE Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2020

Karakteristik	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar		Jumlah
	Sendiri	Lainnya*	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin KRT			
Laki-laki	3,310	11,212	-
Perempuan	4,717	17,140	-
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	7,163	11,954	-
40 Persen Tengah	3,432	15,289	-
20 Persen Teratas	3,188	28,012	-
Pendidikan Tertinggi KRT			
SD ke bawah	6,282	12,797	-
SMP ke atas	2,646	12,859	-
Kota Mataram	2,998	10,333	-

*Lainnya termasuk fasilitas bersama, MCK Umum, dan tidak ada/tidak menggunakan fasilitas buang air besar.

Lampiran 13. RSE Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah), 2020

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Padi-padian	3,219	3,083	3,923	2,485
2. Umbi-umbian	12,014	14,022	9,075	9,935
3. Ikan/udang/cumi/kerang	7,666	6,342	11,216	7,563
4. Daging	10,852	8,597	7,109	7,485
5. Telur dan susu	10,189	14,251	12,246	9,876
6. Sayur-sayuran	5,702	4,780	7,209	5,087
7. Kacang-kacangan	6,592	7,056	8,866	5,912
8. Buah-buahan	11,898	6,575	12,422	9,847
9. Minyak dan kelapa	7,825	4,278	6,602	5,030
10. Bahan minuman	5,610	6,283	7,197	4,620
11. Bumbu-bumbuan	7,219	6,492	8,975	6,418
12. Konsumsi lainnya	7,108	5,788	9,227	5,717
13. Makanan dan minuman jadi	5,145	4,651	12,815	8,492
14. Rokok dan tembakau	8,531	9,935	15,273	7,887
Jumlah Makanan	3,161	2,181	7,094	5,596
15. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	4,271	4,114	6,358	6,545
16. Aneka barang dan jasa	3,903	4,711	10,638	8,354
17. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	6,742	4,264	12,113	8,545
18. Barang tahan lama	17,622	15,713	24,459	17,942
19. Pajak, pungutan, dan asuransi	3,823	5,753	13,233	10,008
20. Keperluan pesta dan upacara/kenduri	47,501	27,451	34,660	28,553
Jumlah Bukan Makanan	3,438	2,791	5,745	6,754
Jumlah Pengeluaran Kota Mataram	2,684	1,561	4,391	5,736

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MATARAM**

Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Rembiga, Mataram
Telp (62370) 642544 Mailbox : bps5271@bps.go.id
Homepage : <http://mataramkota.bps.go.id>

ISBN 978-602-6566-24-9



9 786026 566249